

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

SKRIPSI



Oleh

Nama : Alvin Yulmalida
NIM : 17313103
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2021**

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Alvin Yulmalida
NIM : 17313103
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Agustus 2021

Penulis,



Alvin Yulmalida

PENGESAHAN

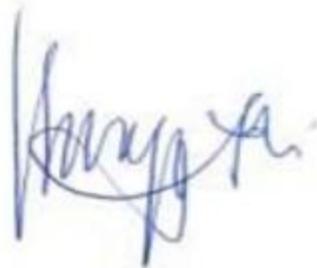
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Alvin Yulmalida
Nomor Mahasiswa : 17313103
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 14 Agustus 2021

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Unggul Priyadi', is written over a faint circular stamp.

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Disusun Oleh : ALVIN YULMALIDA

Nomor Mahasiswa : 17313103

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Selasa, 12 Oktober 2021

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi, Dr,M.Si.

Penguji : Listya Endang Artiani,,S.E., M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

PERSEMBAHAN & MOTTO

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis, yaitu Ibu Yatmini dan Ayah Yuli Suyitno yang telah memberikan segala hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta dan juga kakakku yaitu Alvath Tembria. Penulis persembahkan juga kepada Pak Lek Erwin dan se-keluarga terima kasih telah merekomendasikan kuliah di Kampus UII tercinta ini serta juga telah membantu banyak hal selama penulis di Jogja. Penulis persembahkan juga kepada keluarga besar Imam Basori dan keluarga besar Mbah Nah.

*"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam".
(Al-An'am Ayat 162)*

*"Saya hanya tahu satu hal - bahwa saya tidak tahu apa-apa."
(Socrates)*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah robbil'aalamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya, shalawat beriring salam penulis atur curahkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kehidupan penuh akan cahaya kebenaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat”** dengan baik.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu penulis baik secara moril dan materiil dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

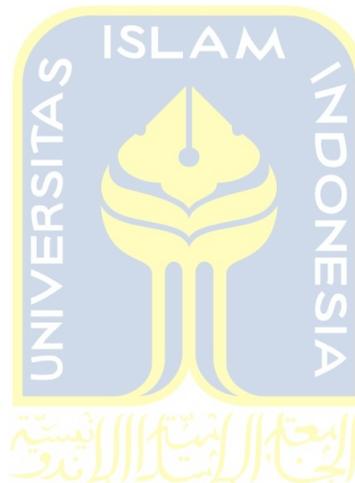
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada hamba-hamba-Nya
2. Kedua Orangtua penulis yaitu Ibu Yatmini, S.Pd dan Ayah Yuli Suyitno, S.T yang telah memberikan dukungan, motivasi dan juga do'a yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta Mas Alvath Tembria S.T yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah beliau dan membalasnya di dunia maupun di akhirat. Allahuma aamiin.
3. Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, saran, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Jaka Sriyana., S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Sahabudin Shidiq S,E., MA. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini. Dosen beserta seluruh staf Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi Khususnya dan Dosen serta Staf Tata Usaha dan Staf Akademik di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Keluarga besar Mbah Nah dan Mbah Imam Basori yang selama ini memberikan dukungan secara moral dan spiritual. Semoga kebaikan kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT.
9. Keluarga HMI MPO FBE UII, yang telah memberikan banyak pembelajaran baik dalam bidang keilmuan, bidang agama dan lain-lain.
10. Teman-teman Lembaga Eksekutif Mahasiswa FE UII periode 2017/2018 dan 2018/2019 terima kasih telah menjadi pembelajaran selama penulis berorganisasi semasa kuliah dan tentunya kunjungan ke Jakarta tak akan penulis lupakan karena banyak ilmu yang penulis dapatkan.
11. Semua teman-teman Ilmu Ekonomi 2017 seperjuangan yang telah banyak membantu, berbagi ilmu dan saling mendukung dan menyemangati dalam kegiatan kuliah.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, oleh Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan perbaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Pembangunan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



Alvin Yulmalida

DAFTAR ISI

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN & MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II.....	6
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6

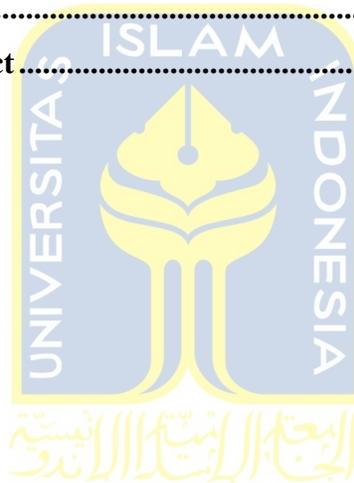
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
2.2.2 Kepariwisataaan.....	16
2.2.3 Kendaraan Bermotor.....	22
2.3 Hipotesis	24
2.3.1 Hipotesis Uji Simultan.....	25
2.3.2 Hipotesis Uji Parsial.....	25
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data	27
3.2 Definisi Variabel Operasional	27
3.3 Metode Analisis	28
3.3.1 Model Common Effect.....	30
3.3.2 Model Fixed Effect.....	31
3.3.3 Model Random Effect.....	32
3.4 Pemilihan Model Yang Tepat Dalam Analisis Regresi Data Panel	32
3.4.1 Uji Chow (Uji F).....	32
3.4.2 Uji LM.....	33
3.4.3 Uji Hausman.....	34
3.5 Uji Statistik	35
3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	35
3.5.2 Uji Parsial (Uji T).....	36
3.5.3 Uji Bersama-Sama (Uji F).....	36

BAB IV	38
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Statistik Deskriptif	38
4.1.1 Statistik Deskriptif Provinsi Nusa Tenggara Barat	39
4.1.2 Statistik Deskriptif Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat	41
4.2 Hasil Analisis Penelitian	54
4.2.1 Hasil Regresi Data Panel Ketiga Model	54
4.2.2 Pemilihan Model Yang Tepat	54
4.2.3 Uji Statistik Dengan Random Effect	57
4.2.4 Pembahasan	60
KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68



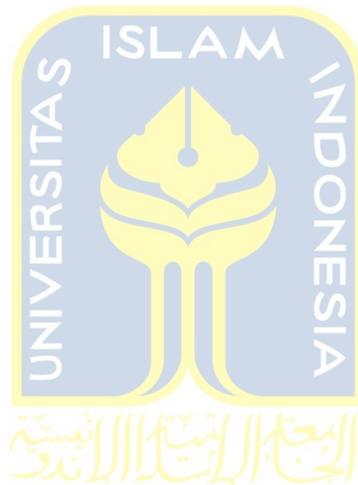
DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi NTB	4
Table 2.1 Kajian Pustaka	9
Table 4.1 Statistik Deskriptif Provinsi	39
Table 4.2 Statistik Deskriptif Kabupaten/Kota	41
Table 4.3 Hasil regresi data panel dengan model common effect, fixed effect, random effect	54
Table 4.4 Uji Chow	55
Table 4.5 Uji Hausman	56
Table 4.6 Uji LM	57
Table 4.7 Random Effect	58



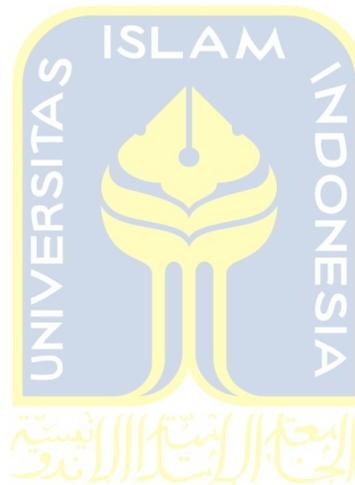
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	23
Gambar 4.1 PAD Kabupaten/Kota	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Data Penelitian	68
Lampiran II: Common Effect	72
Lampiran III: Fixed Effect	73
Lampiran IV :Random Effect	74
Lampiran V: Uji chow	75
Lampiran VI: Uji hausman	76
Lampiran VII: Uji LM	77



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel: jumlah hotel bintang, jumlah hotel non bintang, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB tahun 2011-2019. Metode pengumpulan data dengan data sekunder yang meliputi data dari BPS NTB dan Satu Data NTB. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel. Dalam penelitian ini teknik pemilihan model yang digunakan adalah Random Effects. Hasil penelitian ini secara parsial variabel jumlah hotel bintang dan kendaraan bermotor mempunyai pengaruh Positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Sedangkan variabel jumlah hotel non bintang, restoran dan biro perjalanan wisata tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Secara simultan Bahwa variabel-variabel: jumlah Hotel Bintang, jumlah hotel non bintang, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan wisata, dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap PAD Kabupaten/Kota NTB.

Kata Kunci: PAD, Hotel Bintang dan Hotel non Bintang, Restoran, Biro Perjalanan Wisata, Kendaraan Bermotor



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahap perwujudan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah wajib mengupayakan kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. namun dana perimbangan tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan setiap daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka pelayanan publik daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih berkualitas, serta melakukan investasi pembangunan jangka Panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu bagi pemerintah daerah perhatiannya terhadap pengelolaan pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat vital (Mahmudi, 2019).

Berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pendapatan yang diperoleh dari Daerah disebut dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD yang salah satu bagian dari komponen Pendapatan Daerah merupakan sebagai penambah nilai kekayaan bersih oleh pemerintah daerah dalam periode tahun bersangkutan. Sumber-sumber PAD antara lain yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

Keberhasilan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan yang dimilikinya untuk menggali potensi daerah agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah suatu daerah, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, harus meningkatkan kapasitasnya untuk

menghasilkan sumber-sumber keuangan guna mengurangi kejadian penurunan pertumbuhan pendapatan daerah (Antari & Sedana, 2018).

Demi terwujudnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu bekal keberhasilannya. Tujuan PAD menentukan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi pemerintah seperti melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah melalui prosedur perundang-undangan. Namun, pemerintah daerah harus memperhatikan potensi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya (Carunia, 2017).

Pariwisata merupakan bagian sektor ekonomi yang turut memegang andil dalam perekonomian dunia saat ini. Ketika preferensi konsumen mulai bergeser ke waktu luang, pariwisata adalah produk yang paling mudah dipasarkan. Organisasi pariwisata dunia, *United Nation World Trade Organization* (UNWTO) melansir bahwa wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 dan pertumbuhan kunjungan wisatawan dunia mencapai 3,3 persen per tahun. Industri pariwisata diharapkan mampu memberikan banyak lapangan kerja, menambah pendapatan usaha, dan menjadi motor penggerak pemerintah untuk memperkuat infrastruktur (Pariwisata dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan BPS NTB, 2018).

Pembangunan pariwisata memegang peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperluas lapangan kerja. Efek tersebut antara lain tercermin dari kontribusi pariwisata kepada wisatawan mancanegara (wisman), nilai tambah produk domestik bruto, dan devisa negara yang dihasilkan dari penyerapan tenaga kerja. Selain itu, industri pariwisata juga berperan dalam meningkatkan jati diri bangsa,

mendorong kesadaran masyarakat dan memperkaya kekayaan budaya negara dengan memperkenalkan produk pariwisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan lautan, museum, kesenian dan tradisi rakyat, serta lingkungan yang efektif. tindakan perlindungan, efek. Perlindungan alam dan budaya serta seni tradisional (Asworowati, 2017).

Pemerintah hingga saat ini menetapkan “Pesona Indonesia” atau “*Wonderful Indonesia*” sebagai *branding* negara Indonesia. *Branding* tersebut terbukti telah berhasil meningkatkan kepribadian, jati diri, citra, dan nama baik negara serta kepercayaan mancanegara terhadap negara Indonesia (Setkab, 2017). Branding ini akan membantu menyumbang devisa negara dan pendapatan daerah yang pada tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melansir web (dishub NTB), KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, KEK Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau di bagian selatan Pulau Lombok.

Kendaraan bermotor di Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah setiap tahunnya. Tingkat jumlah kendaraan bermotor yang tinggi akan berdampak pada berbagai sektor. Dampak Yang ditimbulkan seperti kemacetan, polusi, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas (pangestu & rahayu, 2018). Menurut Nisak & prakoso (2015), “Salah satu penyebab peningkatan jumlah kendaraan tersebut karena kemudahan dalam pembelian kendaraan dengan cara kredit”.

Table 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi NTB

Tahun	Jumlah KB	%
2019	1.561.454	5,2
2018	1.553.181	19,8
2017	1.295.619	39,7
2016	927.428	-31,1
2015	1.347.545	0
2014	1.347.545	5,3
2013	1.278.620	14,4
2012	1.116.744	14,1
2011	978.694	-

*Sumber: BPS Provinsi NTB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bis, mobil truk dan sepeda motor setiap tahunnya cenderung meningkat dan juga sepeda motor yang paling banyak mendominasi jumlah kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016 menurun sebesar 31,1% dengan jumlah sebesar 927.428 unit. Penyebab menurunnya tahun 2016, yakni menurunnya daya beli masyarakat NTB terhadap kendaraan bermotor.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor paling tinggi yakni 2017 dengan tingkat 39,7%, tercatat dari data inflasi bahwa pada 2017 meningkat sebesar 3,70 persen. Artinya meningkatnya daya beli masyarakat atas permintaan kendaraan bermotor. Kemudian Jumlah kendaraan bermotor paling banyak yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 1.561 454 unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentu sangat berdampak terhadap pendapatan asli daerah, salah satunya hasil yang didapatkan yakni dari pajak kendaraan bermotor.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh secara parsial variabel-variabel: jumlah hotel bintang, jumlah hotel non bintang, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan variabel-variabel jumlah hotel bintang, jumlah hotel non bintang, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial variabel-variabel: jumlah hotel bintang, jumlah hotel non bintang, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan variabel-variabel jumlah hotel bintang, jumlah hotel non bintang, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan khususnya di Kabupaten/Kota NTB. Bagi penelitian selanjutnya bisa digunakan untuk rujukan terkait pengaruh variabel-variabel jumlah hotel bintang, jumlah hotel non bintang, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai perbandingan atau acuan terhadap penelitian yang dilakukan saat ini. sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian, adapun penelitian yang dulu sudah pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simangunsong (2014), telah meneliti Analisis Komponen Tingkat Kemampuan Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sumatera Utara dengan alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik. Variabel dependen (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen (X) yaitu variabel konsumsi, variabel jumlah kendaraan bermotor, variabel populasi, variabel pendapatan per kapita, dan variabel pengeluaran/belanja daerah. Hasil menyatakan bahwa variabel Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara. Variabel Populasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara. Untuk variabel Konsumsi, variabel Pendapatan per kapita, dan variabel Pengeluaran/Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kamalia (2019), Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode data panel. Variabel dependen (Y) yaitu PAD sedangkan Variabel Independen (X) yaitu jumlah wisatawan, jumlah penduduk, belanja modal, dan jumlah hotel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah wisatawan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan variabel jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Paramacintya & Budhi (2018), telah meneliti Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Pajak Hotel Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung

dengan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis jalur. Variabel dependen (Y) yaitu variabel Pajak Hotel Restoran dan variabel PAD sedangkan variabel independen (X) yaitu variabel jumlah biro perjalanan wisata dan variabel jumlah kunjungan wisatawan. Hasil menyatakan bahwa variabel jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak hotel restoran, variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel restoran, variabel jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD, variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, variabel pajak hotel restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, variabel jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh terhadap PAD melalui pajak hotel restoran, dan variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui pajak hotel restoran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya & Wijaya (2020), telah meneliti Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat dengan alat analisis yaitu teknik *purposive sampling* dengan analisis regresi berganda. Variabel dependen (Y) yaitu PAD di Sumatera Barat sedangkan variabel independen (X) yaitu jumlah hotel dan jumlah restoran. Hasil menyatakan bahwa variabel jumlah hotel dan variabel jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dan hasil penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustri (2011), telah meneliti Analisis Pengaruh Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan PAD di Sumatera Barat selama periode 1979-2008 dengan alat analisis analisis regresi berganda ols (ordinary least square) menggunakan metode selisih logaritma. Variabel dependen (Y) yaitu PAD Sumatera Barat sedangkan variabel independen (X) yaitu PDRB dan jumlah kendaraan bermotor. Hasil menyatakan bahwa PDRB dan jumlah kendaraan mempunyai

hubungan positif dan signifikan terhadap PAD selama periode 1979-2008. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan PDRB di masa yang akan datang dan melakukan identifikasi pendapatan jumlah kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD di Sumatera Barat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santi (2018), telah meneliti Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016 dengan menggunakan metode alat analisis regresi data panel. Variabel dependen (Y) yaitu PAD di kabupaten/kota DIY sedangkan variabel independen (X) yaitu jumlah kamar hotel, jumlah wisatawan, jumlah objek wisata dan jumlah biro perjalanan wisata. Hasil menyatakan bahwa variabel jumlah kamar hotel dan jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan jumlah objek wisata dan jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan berbagai penelitian yang terdahulu yang disajikan di atas, penelitian ini mengacu rujukan utamanya pada penelitian Nailia Kamalia dan Rifki Khoirudin (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah wisatawan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY. Secara umum persamaannya penelitiannya adalah penelitian data kuantitatif yang Menggunakan metode analisis regresi data Panel. Secara uji parsial Menganalisis variabel jumlah hotel terhadap PAD. Adapun perbedaan penelitian ini menjelaskan Penelitian berlokasi di Provinsi DIY dan Menganalisis variabel jumlah wisatawan terhadap PAD.

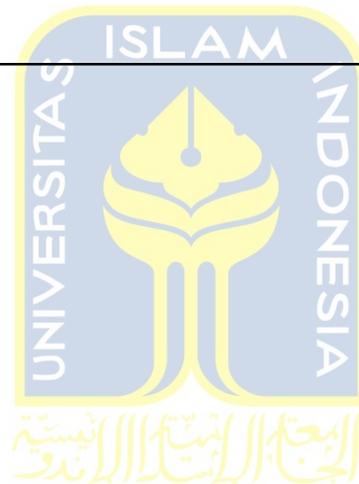
Table 2.1 Kajian Pustaka

Keterangan	Hasil	Perbedaan	Persamaan
<p>Simangunsong (2014). <i>Analisis Komponen Tingkat Kemampuan Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sumatera Utara</i></p> <p>Penelitian data kuantitatif dengan menggunakan uji asumsi klasik.</p>	<p>Hasil menyatakan bahwa variabel Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara. Variabel Populasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara. Untuk variabel Konsumsi, variabel Pendapatan per kapita, dan variabel Pengeluaran/Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.</p>	<p>Penelitian berlokasi di Provinsi Sumatera Utara Menggunakan metode alat analisis yaitu uji asumsi klasik.</p> <p>Menganalisis variabel-variabel: Populasi, Konsumsi, Pendapatan per kapita, dan Pengeluaran/Belanja Daerah.</p>	<p>Penelitian data kuantitatif</p> <p>Menganalisis variabel jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD.</p>
<p>Kamalia (2019), <i>Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta</i></p> <p>Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan Analisis regresi data panel.</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah wisatawan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY.</p>	<p>Penelitian berlokasi di Provinsi DIY.</p> <p>Menganalisis variabel jumlah wisatawan terhadap PAD.</p>	<p>Penelitian data kuantitatif</p> <p>Menggunakan metode analisis regresi data Panel Menganalisis variabel jumlah hotel terhadap PAD.</p>
<p>Paramacintya dan Budhi (2018),</p>	<p>Hasil menyatakan bahwa variabel jumlah</p>	<p>Penelitian berlokasi di</p>	<p>Penelitian data</p>

<p><i>Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Pajak Hotel Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.</i></p> <p>Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur.</p>	<p>biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak hotel restoran, variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel restoran, variabel jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD, variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, variabel pajak hotel restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, variabel jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh terhadap PAD melalui pajak hotel restoran, dan variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui pajak hotel restoran.</p>	<p>Kabupaten Badung</p> <p>Menganalisis variabel biro perjalanan wisata dan jumlah kunjungan wisata terhadap pajak hotel restoran</p> <p>Menganalisis variabel jumlah wisatawan terhadap PAD</p> <p>Menganalisis pajak hotel restoran terhadap pendapatan asli daerah</p> <p>Menggunakan metode alat penelitian yaitu analisis jalur.</p>	<p>kuantitatif.</p> <p>Menganalisis variabel Jumlah Biro Perjalanan Wisata terhadap PAD.</p>
<p>Sanjaya dan Wijaya (2020), <i>Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat.</i></p> <p>Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan Metode <i>purposive sampling</i> dengan analisis regresi berganda.</p>	<p>Hasil menyatakan bahwa variabel jumlah hotel dan variabel jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dan hasil penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.</p>	<p>Penelitian berlokasi di provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Menggunakan alat analisis yaitu Metode <i>purposive sampling</i> dengan analisis regresi berganda</p> <p>Menganalisis variabel penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran terhadap PAD di Sumatera</p>	<p>Penelitian data kuantitatif</p> <p>Menganalisis variabel jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap PAD</p>

		Barat.	
<p>Agustri (2011). <i>Analisis pengaruh Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan PAD di Sumatera Barat selama periode 1979-2008.</i></p> <p>Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan metode <i>ols</i> (<i>ordinary Least Square</i>), yakni analisis regresi berganda dengan memakai metode selisih logaritma.</p>	<p>Hasil menyatakan bahwa variabel PDRB dan jumlah kendaraan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap PAD selama periode 1979-2008. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan PDRB di masa yang akan datang dan melakukan identifikasi pendapatan jumlah kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD di Sumatera Barat.</p>	<p>Berlokasi di Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>alat analisis analisis regresi berganda <i>ols</i> (<i>ordinary least square</i>) menggunakan metode selisih logaritma</p> <p>Menganalisis variabel PDRB terhadap PAD</p>	<p>Penelitian data kuantitatif.</p> <p>Menganalisis variabel jumlah kendaraan terhadap PAD.</p>
<p>Santi (2018), <i>Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016.</i></p> <p>Penelitian data kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.</p>	<p>Hasil menyatakan bahwa variabel jumlah kamar hotel dan jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan jumlah objek wisata dan jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.</p>	<p>Penelitian berlokasi di Provinsi DIY</p> <p>Menganalisis variabel jumlah kamar hotel dan jumlah wisatawan terhadap PAD.</p>	<p>Penelitian data kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi data panel</p> <p>Menganalisis variabel jumlah biro perjalanan pariwisata terhadap PAD.</p>
<p>Alvin Yulmalida (2021) <i>Analisis Faktor-Faktor yang</i></p>		<p>Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>	

<p><i>Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</i></p> <p>Penelitian data kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.</p>			
---	--	--	--



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pendapatan yang diperoleh dari Daerah disebut dengan PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil pendapatan yang bersumber dari ekonomi asli daerah tersebut. PAD memiliki 4 bagian yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2.1.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah terdiri dari: pajak provinsi, pajak kabupaten/kota,

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.1.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Jenis Retribusi terbagi 3 yakni Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

1. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.2.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga (BPS, 2019).

Menurut PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah yang dikelola berasaskan tertib, efisien, transparan, dan akuntabel dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

2.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan nama Lain-lain PAD Yang Sah dipungut penerimaan sebagai pembayaran atas:

1. Hasil penjualan aset Daerah
2. Jasa Giro
3. Sumbangan Pihak Ketiga
4. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)
5. Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga
6. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
7. Kontribusi Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di Daerah
8. Komisi, rapat, potongan, bunga atau nama lainnya.

2.2.2 Kepariwisata

Institute of Tourism in Britain (sekarang *Tourism Society in Britain*) di tahun 1976 merumuskan pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan pekerjaan sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan

tersebut; ini mencakup kepergian berbagai maksud, termasuk kunjungan sehari-hari atau darmawisata/ekskursi (Pendit, 2003:33).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisata bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. menghapus kemiskinan;
4. mengatasi pengangguran;
5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. memajukan kebudayaan;
7. mengangkat citra bangsa;
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. mempererat persahabatan antarbangsa.

2.2.2.1 Hotel

Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan (Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel).

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Beberapa kriteria dalam menentukan klasifikasi hotel mencakup:

1. Persyaratan fisik meliputi kondisi bangunan dan perlengkapannya
2. Bentuk pelayanan yang diberikan
3. Kualifikasi tenaga kerja dari segi pendidikan dan tingkat kesejahteraan karyawan
4. Jumlah kamar yang tersedia
5. Ketersediaan fasilitas ruang pertemuan, olahraga, dan hiburan.

2.2.2.1.1 Hotel Bintang

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Hotel Bintang adalah usaha penyediaan akomodasi jangka pendek yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang dan ditetapkan oleh instansi khusus yang membinanya (Dinas Pariwisata Daerah). Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Penilaian Hotel Bintang menggunakan rentang nilai sebagai berikut:

1. ≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima;
2. 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat;
3. 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga;
4. 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan
5. 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu.

Menurut Bataafi (2006), Hotel bintang berdasarkan Penggolongan fasilitas dan persyaratan sebagai berikut:

1. Hotel Berbintang Satu (1)

Standar minimal kamar dengan sejumlah 15 kamar, luas minimal sebesar 22 m²/kamar dan dilengkapi dengan kamar mandi di dalam kamar.

2. Hotel Berbintang Dua (2)

Standar minimal kamar dengan sejumlah 20 kamar, dengan luas minimal sebesar 22 m²/kamar, Jumlah kamar suite minimal 1 kamar dengan luas minimal sebesar

44 m²/kamar, dan dilengkapi dengan kamar mandi di dalam kamar untuk setiap kamar.

3. Hotel Berbintang Tiga (3)

Standar minimal kamar dengan sejumlah 30 kamar, dengan luas minimal sebesar 24 m²/kamar, Jumlah kamar suite minimal 2 kamar dengan luas minimal sebesar 48 m²/kamar, dan dilengkapi dengan kamar mandi di dalam kamar untuk setiap kamar.

4. Hotel Berbintang Empat (4)

Standar minimal kamar dengan sejumlah 50 kamar, dengan luas minimal sebesar 24 m²/kamar, Jumlah kamar suite minimal 3 kamar dengan luas minimal 48 m²/kamar, dan dilengkapi dengan kamar mandi di dalam kamar untuk setiap kamar.

5. Hotel Berbintang Lima (5)

Standar minimal kamar dengan sejumlah 100 kamar dengan luas minimal sebesar 26 m²/kamar, Jumlah kamar suite minimal 4 kamar dengan luas minimal sebesar 52 m²/kamar, dan dilengkapi dengan kamar mandi di dalam kamar untuk setiap kamar.

2.2.2.1.2. Hotel Non Bintang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel, Hotel Non Bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), dalam hotel non bintang atau akomodasi lainnya meliputi hotel melati, penginapan remaja, pondok wisata, dan penginapan lainnya yang penggunaannya dikenakan biaya.

1. Hotel Melati ialah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan

telah memenuhi persyaratan sebagai hotel melati yang ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah.

2. Penginapan Remaja ialah usaha jasa pelayanan penginapan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/ pengalaman.
3. Pondok Wisata ialah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian atau seluruh dari tempat tinggalnya.
4. Jasa akomodasi lainnya adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan selain hotel melati, penginapan remaja, dan pondok wisata (misalnya wisma dan losmen).

2.2.2.2 Restoran

Usaha Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Setiap Usaha Restoran, wajib memiliki Sertifikat Usaha Restoran dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Restoran, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No.11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran, pasal 1).

Jenis jenis restoran (Bagyono, 2005:65-66):

1. *Ala carte Restaurant*, yaitu Restoran yang menjual makanan, lengkap dengan banyak variasi, sehingga tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan.
2. *Table d'hote restaurant*, yaitu restoran yang menjual makanan dengan menu lengkap (dari hidangan pembuka sampai penutup) dan dengan harga satu set/ paket.

3. *Coffee shop*, yaitu restoran yang ada dalam sebuah hotel menyajikan makanan secara cepat dengan sistem pelayanan Amerika (*ready plate*). *Coffee Shop* biasanya buka selama 24 jam nonstop.
4. *Seafood restaurant*, Yaitu restoran yang menjual makanan khas laut.
5. *Cafeteria/cafe*, yaitu restoran kecil yang mengutamakan penjualan kue (*cake*), sandwich, (roti isi), kopi, teh, dan sejenisnya.
6. *Canteen*, yaitu Rumah Makan yang berhubungan dengan kantor, pabrik, sekolahan, menyediakan makan siang, *coffee break*, dan makanan kecil dengan harga relatif murah.
7. *Pizzeria*, yaitu restoran yang khusus Menjual *pizza*, *spaghetti* dan juga makanan Italia lainnya.

2.2.2.3 Biro Perjalanan Wisata

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata dalam pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 9 ayat 1, menyatakan Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa yaitu:

1. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata.
2. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen.
3. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual.
4. Penyediaan layanan angkutan wisata.

5. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata.
6. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
8. Penyelenggaraan perjalanan insentif.

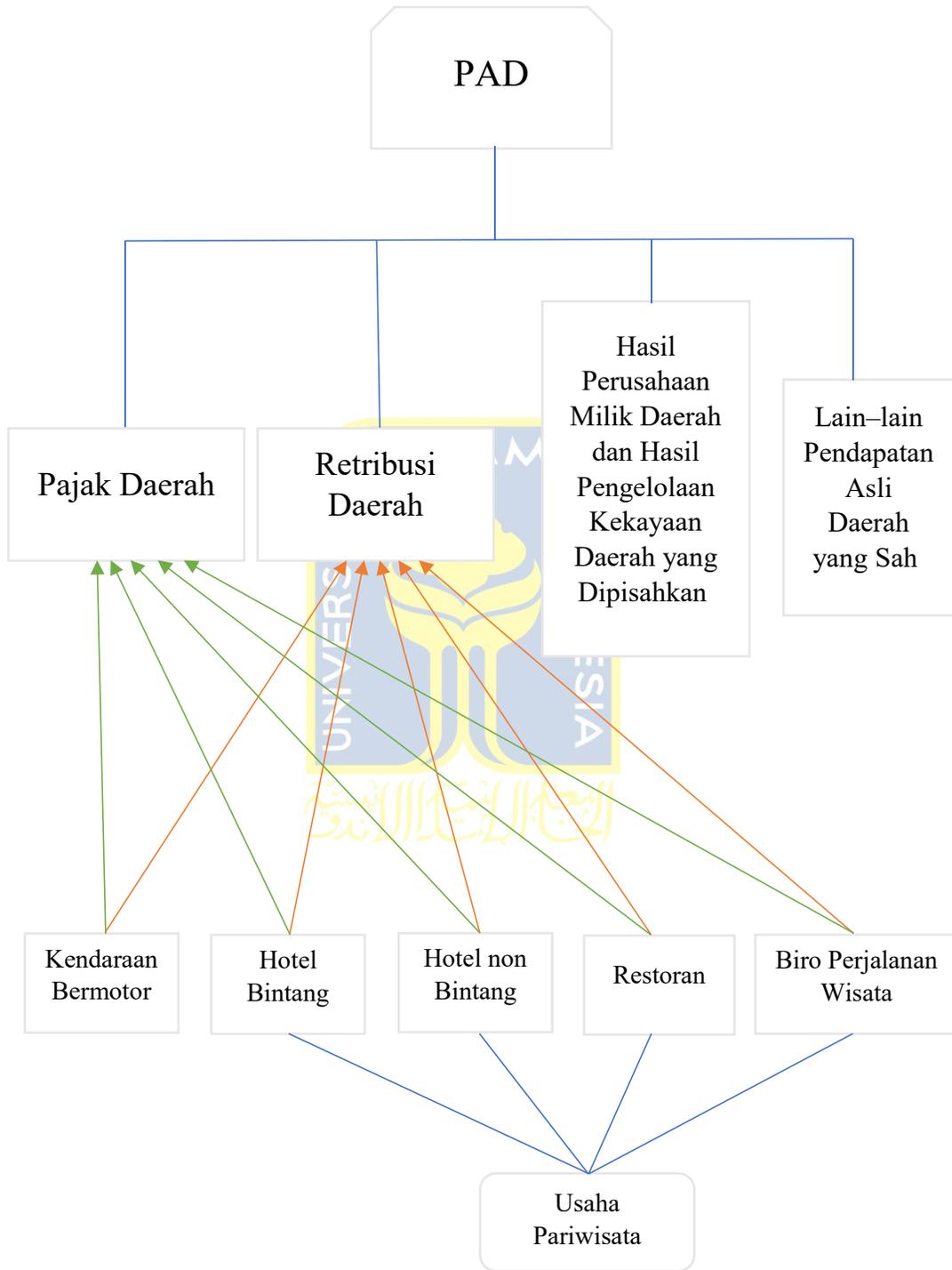
2.2.3 Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2005:139), kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Menurut Penelitian Pratiwi (2018), Jumlah kendaraan bermotor akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara langsung. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, bisanya akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), jenis kendaraan bermotor yakni:

1. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.
2. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.
3. Mobil Truk adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, selain mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan bermotor roda dua.
4. Sepeda Motor adalah setiap kendaraan bermotor yang beroda dua.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga secara simultan variabel-variabel: jumlah hotel bintang, jumlah hotel non bintang, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.
2. Diduga secara parsial variabel jumlah hotel bintang mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Jika variabel jumlah hotel bintang naik, maka PAD di Kabupaten/Kota NTB meningkat. Jika variabel jumlah hotel bintang turun, maka PAD di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat menurun.
3. Diduga secara parsial variabel jumlah hotel non bintang mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Jika variabel jumlah hotel non bintang naik, maka PAD di Kabupaten/Kota NTB meningkat. Jika variabel jumlah hotel non bintang turun, maka PAD di Kabupaten/Kota NTB menurun.
4. Diduga secara parsial variabel jumlah restoran mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Jika variabel jumlah restoran naik, maka PAD di Kabupaten/Kota NTB meningkat. Jika variabel jumlah restoran turun, maka PAD di Kabupaten/Kota NTB menurun.
5. Diduga secara parsial variabel jumlah biro perjalanan wisata mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Jika variabel jumlah biro perjalanan wisata naik, maka PAD di Kabupaten/Kota NTB meningkat. Jika variabel jumlah biro perjalanan wisata turun, maka PAD di Kabupaten/Kota NTB menurun.
6. Diduga secara parsial variabel jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Jika variabel jumlah kendaraan bermotor naik, maka PAD di Kabupaten/Kota NTB meningkat. Jika variabel jumlah kendaraan bermotor turun, maka PAD di Kabupaten/Kota NTB menurun.

2.3.1 Hipotesis Uji Simultan

H₀: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara simultan jumlah Hotel Bintang, Hotel non Bintang, Restoran, Biro Perjalanan Wisata dan Kendaraan Bermotor terhadap PAD).

H_a: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$ (terdapat pengaruh secara simultan jumlah Hotel Bintang, Hotel non Bintang, Restoran, Biro Perjalanan Wisata dan Kendaraan Bermotor terhadap PAD).

2.3.2 Hipotesis Uji Parsial

2.3.2.1 Hotel Bintang

H₀: $\beta_1 = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara simultan jumlah Hotel Bintang terhadap PAD).

H_a: $\beta_1 \neq 0$ (terdapat pengaruh secara simultan jumlah Hotel Bintang terhadap PAD).

2.3.2.2 Hotel non Bintang

H₀: $\beta_2 = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara simultan jumlah Hotel non Bintang terhadap PAD).

H_a: $\beta_2 \neq 0$ (terdapat pengaruh secara simultan jumlah Hotel non Bintang terhadap PAD).

2.3.2.3 Restoran

H₀: $\beta_3 = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara simultan jumlah Restoran terhadap PAD).

H_a: $\beta_3 \neq 0$ (terdapat pengaruh secara simultan jumlah Restoran terhadap PAD).

3.2.4 Biro Perjalanan Wisata

H₀: $\beta_4 = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara simultan jumlah Biro Perjalanan Wisata terhadap PAD).

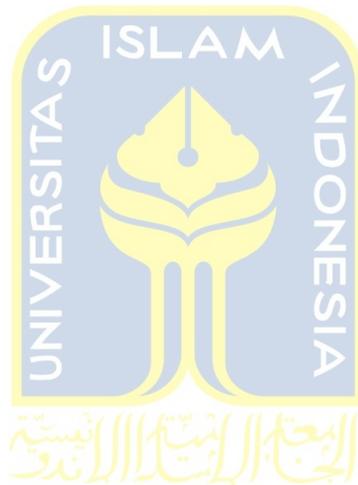


Ha: $\beta_4 \neq 0$ (terdapat pengaruh secara simultan jumlah Biro Perjalanan Wisata terhadap PAD).

3.2.5 Jumlah Kendaraan Bermotor

H0: $\beta_5 = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara simultan jumlah Kendaraan Bermotor terhadap PAD).

Ha: $\beta_5 \neq 0$ (terdapat pengaruh secara simultan jumlah Kendaraan Bermotor terhadap PAD).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan yaitu data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan data *cross section* dari tahun 2011-2019 di kabupaten/kota se-NTB. Penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel jumlah hotel bintang, jumlah hotel non bintang, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan pariwisata dan jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.

3.2 Definisi Variabel Operasional

Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di NTB pada tahun 2011 hingga tahun 2019. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni variabel jumlah Hotel bintang, Hotel non bintang, restoran, Biro perjalanan wisata, dan Kendaraan bermotor pada tahun 2011 hingga tahun 2019.

Definisi variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Data jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di NTB didapatkan dari BPS NTB, yang diambil berdasarkan tahun 2011-2019 dalam satuan ribu rupiah.

2. Hotel Bintang (X1)

Banyaknya jumlah hotel yang penilaian memenuhi kriteria penggolongan kelas hotel dari bintang satu sampai bintang lima yang berada di Kabupaten/Kota

NTB. Data jumlah yang digunakan Hotel Bintang di Kabupaten/Kota NTB yaitu dari BPS NTB, yang diambil berdasarkan tahun 2011-2019 dalam satuan unit.

3. Hotel Non Bintang (X2)

Banyaknya jumlah hotel yang memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel di bawah hotel bintang satu yang berada di Kabupaten/Kota NTB. Data jumlah yang digunakan Hotel Non Bintang di Kabupaten/Kota NTB dari BPS NTB, yang diambil berdasarkan tahun 2011-2019 dalam satuan unit.

4. Restoran (X3)

Banyaknya jumlah Usaha Restoran, wajib memiliki Sertifikat Usaha Restoran dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Restoran, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang berada di Kabupaten/Kota NTB. Data jumlah restoran yang digunakan Kabupaten/Kota NTB didapatkan data dari BPS NTB dan Satu Data NTB, berdasarkan tahun 2011-2019 dalam satuan unit.

5. Biro Perjalanan Wisata (X4)

Banyaknya Jumlah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah yang berada di Kabupaten/Kota NTB. Data jumlah Biro perjalanan wisata yang digunakan Kabupaten/Kota NTB didapatkan data dari BPS NTB dan Satu Data NTB, berdasarkan tahun 2011-2019 dalam satuan unit.

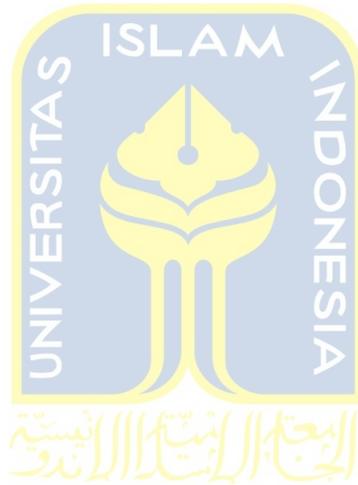
6. Kendaraan Bermotor X5)

Banyaknya jumlah yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps Diplomatik yang berada di Kabupaten/Kota NTB. Data jumlah kendaraan bermotor yang digunakan Kabupaten/Kota NTB didapatkan data dari BPS NTB, berdasarkan tahun 2011-2019 dalam satuan unit.

3.3 Metode Analisis

Pengolahan data dalam analisis ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan metode regresi data panel untuk melakukan penelitian apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen.

$$\ln PADit = \beta_0 + \beta_1 \ln HBit + \beta_2 \ln HNBit + \beta_3 \ln Rit + \beta_4 \ln BPWit + \beta_5 \ln KBit + \varepsilon it$$



Keterangan:

PAD	=	Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah)
HB	=	Hotel Bintang (unit)
HNB	=	Hotel Non Bintang (unit)
R	=	Restoran (unit)
BPW	=	Biro Perjalanan Wisata (unit)
KB	=	Kendaraan Bermotor (unit)
β_0	=	Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	=	Koefisien Regresi
ε	=	Variabel Di Luar Model
I	=	entitas ke-i
t	=	periode ke-t

Terdapat keuntungan ketika menggunakan data panel yaitu merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, sehingga dengan menggunakan data panel maka data yang diperoleh akan lebih banyak yang akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Keuntungan selanjutnya yaitu dengan menggunakan data panel masalah penghilangan variabel (omitted-variable) dapat teratasi karena terdapat gabungan informasi dari data *time series* dan data *cross-section* (Widarjono, 2013).

3.3.1 Model Common Effect

Pendekatan *common effect* merupakan pendekatan data panel yang hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan perbedaan antar waktu dan perbedaan antar individu, dengan kata lain metode *common effect* mengasumsikan bahwa perilaku antar data individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model *common effect* ini diestimasi menggunakan metode *OLS* (*Ordinary Least Square*). Berikut persamaan regresi data panel dengan menggunakan model *common effect* (Widarjono, 2013):

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

i = Banyaknya observasi (1,2,...,n)

t = Banyaknya waktu (1,2,...,t)

n x t = Banyaknya data panel

ε = residual

3.3.2 Model Fixed Effect

Pendekatan *fixed effect* merupakan pendekatan data panel yang melihat atau memperhatikan perbedaan konstanta dalam model. Dalam pendekatan *fixed effect* ini menyatakan bahwa dalam berbagai periode waktu objek observasi memiliki nilai konstanta tetap dan koefisien regresi yang tetap dari waktu ke waktu. Terdapat dua asumsi yang digunakan dalam pendekatan *fixed effect* yaitu *slope* konstan namun intersep bervariasi antar unit dan *slope* konstan namun intersep bervariasi antar unit dan antar periode waktu. Untuk menjelaskan adanya perbedaan intersep maka dimasukkan variabel semu (*dummy*) dalam model *fixed effect*. Model *fixed effect* ini diestimasi menggunakan metode *LSDV (Least Squares Dummy Variables)*. Berikut persamaan regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect* dengan asumsi *slope* regresi konstan namun intersep berbeda-beda antar unit (Jaka Sriyana, 2014):

$$Y_{it} = \beta_0 i + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

I = Banyaknya observasi (1,2,...,n)

t = Banyaknya waktu (1,2,...,t)

n x t = Banyaknya data panel

ε = residual

3.3.3 Model Random Effect

Model *random effect* merupakan model yang mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep dan konstanta yang disebabkan oleh residual yang merupakan akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara acak (*random*), sehingga model *random effect* ini disebut juga dengan *error component* model. Sama dengan *fixed effect* bahwa model *random effect* juga memiliki dua asumsi yaitu intersep, *slope* berbeda antar individu dan intersep, *slope* berbeda antar individu dan periode waktu. Berikut persamaan model *random effect* dengan asumsi intersep dan *slope* berbeda antar individu (Jaka Sriyana, 2014):

$$Y_{it} = \beta_0 i + \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

i = Banyaknya observasi (1,2,...,n)

t = Banyaknya waktu (1,2,...,t)

$n \times t$ = Banyaknya data panel

ε = residual

3.4 Pemilihan Model Yang Tepat Dalam Analisis Regresi Data Panel

Menurut Sriyana (2014) terdapat tiga uji yang dapat digunakan untuk memilih model yang tepat dalam regresi data panel, adapun tiga uji tersebut yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Uji Chow (Uji F)

Uji F yaitu uji yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* yaitu model yang mengasumsikan bahwa *slope* dan intersep tetap antar individu dan antar waktu atau model *fixed effect* yaitu model yang mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep dengan menambahkan variabel *dummy* untuk regresi data panel yang tepat. Uji F dilakukan dengan cara melihat nilai *sum of squares (RSS)* dari model *common effect* dan model *fixed effect*. Berikut rumus untuk mencari nilai F statistik:

$$F_{hitung} = \frac{(RSS1 - RSS2)/i - 1}{(RSS2)/(it - i - k)}$$

Keterangan:

RSS1 = residual *sum squares* dari model *common effect*

RSS2 = residual *sum squares* dari model *fixed effect*

I = jumlah individu

t = jumlah periode waktu

k = banyaknya parameter dalam model *fixed effect*

Setelah didapatkan nilai F hitung maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai F tabel, nilai F tabel dapat diperoleh dengan df sebesar m untuk numerator dan n-k untuk denominator. Uji F memiliki hipotesis sebagai berikut:

H0 = Tidak ada perbedaan dalam intersep (model *common effect*)

Ha = Terdapat perbedaan dalam intersep (model *fixed effect*)

Apabila nilai F hitung lebih besar (>) daripada F tabel, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan dalam intersep. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil (<) daripada F tabel maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan dalam intersep. Selain menggunakan nilai F hitung dan F tabel untuk memilih model yang tepat yaitu menggunakan probabilitas. Apabila probabilitas yang didapatkan kurang dari (<) alpha (α) 0.10 maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, apabila probabilitas yang didapatkan lebih dari (>) alpha (α) maka H0 diterima.

3.4.2 Uji LM

Uji LM yaitu uji yang digunakan untuk memilih antara model *random effect* yaitu model atau model *common effect* yang menggunakan OLS (*Ordinary Least Squares*). Berikut rumus untuk mencari nilai LM:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{i=1}^n \epsilon_{it}}{\sum_{i=1}^n \sum_{i=1}^n \epsilon_{it}^2} - 1 \right]^2$$

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \frac{\sum_{i=1}^n (T - \overline{\epsilon_{it}})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{i=1}^n \epsilon_{it}^2}$$

Keterangan:

t = jumlah periode waktu

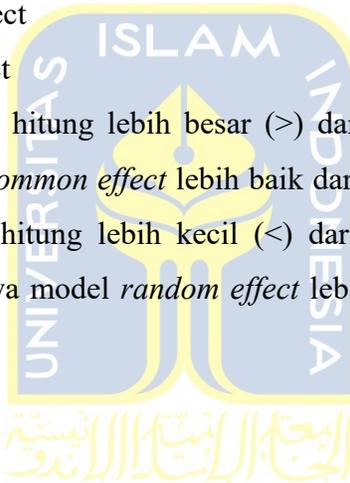
ϵ = residual dari model common effect

Setelah didapatkan nilai LM hitung, maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai X2 tabel. Untuk mencari nilai X2 tabel menggunakan df sebagai jumlah variabel independen yang digunakan dalam model. Hipotesis yang digunakan dalam uji LM sebagai berikut:

H0 = Model common effect

Ha = Model random effect

Apabila nilai LM hitung lebih besar (>) daripada nilai X2 tabel, maka H0 diterima, artinya model *common effect* lebih baik daripada model *random effect*. Dan sebaliknya, apabila LM hitung lebih kecil (<) daripada nilai X2 tabel, maka H0 ditolak yang berarti bahwa model *random effect* lebih baik daripada model *common effect*.



3.4.3 Uji Hausman

Uji hausman merupakan uji yang digunakan untuk memilih apakah model yang menggunakan metode *LSDV (model fixed effect)* lebih baik daripada menggunakan metode *GLS (model random effect)*. Berikut rumus untuk menghitung nilai Hausman statistik (kriteria Wald) yang akan mengikuti distribusi *chi-squares*:

$$w = x^2[K] = [(\widehat{\beta}, \widehat{\beta} \text{ GLS})]' \sum^{-1} [(\widehat{\beta}, \widehat{\beta} \text{ GLS})]$$

Setelah didapatkan nilai Hausman statistik (W hitung) maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai kritis *chi-squares*. Berikut hipotesis untuk uji hausman:

H0 = Model *random effect*

Ha = Model *fixed effect*

Apabila nilai W hitung lebih besar (>) daripada nilai kritis *chi-squares* maka H0 diterima, artinya model *random effect* lebih baik daripada model *fixed effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai W hitung lebih kecil (<) daripada nilai kritis *chi-squares* maka H0 ditolak, artinya model *random effect* lebih baik daripada model *fixed effect*.

Selain menggunakan nilai W hitung dengan nilai kritis *chi-squares*, dapat digunakan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas lebih kecil (<) daripada nilai alpha (α) maka H0 diterima. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar (>) daripada nilai alpha (α) maka H0 ditolak (Widarjono (2013), Sriyana (2014)).

3.5 Uji Statistik

Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik berupa koefisien determinasi (R^2), uji secara parsial (Uji T) dan uji secara bersama-sama (Uji F).

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa baik analisis dalam model, besarnya nilai R^2 menentukan proporsi variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen yang digunakan dalam model, sementara selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Berikut rumus untuk mencari nilai R^2 :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

$$R^2 = 1 - \frac{ESS}{TSS}$$

$$R^2 = 1 - (\sum \hat{e}^2) / (\sum y^2 i)$$

$$R^2 = 1 - (\sum \hat{e}^2) / (\sum Yi - \bar{Y})^2$$

Namun, nilai R^2 akan mengalami peningkatan apabila terjadi penambahan variabel independen, sehingga terdapat alternatif dari R^2 yaitu disebut dengan \bar{R}^2 yang disesuaikan. Berikut rumus untuk mencari nilai \bar{R}^2 yang disesuaikan:

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{(\sum \hat{e}^2 i) / (n - k)}{(\sum Yi - \bar{Y})^2 / (n - 1)}$$

3.5.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ketika satu variabel independen diuji maka diasumsikan bahwa variabel independen lainnya dianggap tetap, dan seperti itu seterusnya. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari nilai t hitung:

$$t = \frac{\widehat{\beta}_1}{se(\widehat{\beta}_1)}$$

Selanjutnya, diperlukan mencari nilai t kritis untuk menentukan apakah terdapat pengaruh secara parsial atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t kritis dapat didapatkan di tabel t dengan melihat nilai *degree of freedom* (df) = $n-k$ dan alpha (0.10) Adapun hipotesis untuk uji t sebagai berikut:

$H_0 = \beta_1 = 0$ (Secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen).

$H_a = \beta_1 \neq 0$ (Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen).

Ketika nilai t hitung lebih besar ($>$) daripada t kritis maka H_0 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya apabila nilai t hitung lebih kecil ($<$) daripada t kritis maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selain menggunakan nilai t hitung dan t kritis dapat digunakan nilai probabilitas untuk menentukan terdapat pengaruh atau tidak secara parsial variabel independen terhadap dependen, yaitu ketika nilai probabilitas lebih kecil ($<$) daripada alpha (α) 0.10 maka H_0 diterima. Dan sebaliknya, ketika nilai probabilitas lebih besar ($>$) daripada alpha (α) 0.10 maka H_0 ditolak.

3.5.3 Uji Bersama-Sama (Uji F)

Uji F bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Berikut rumus untuk mencari nilai F hitung:

$$F = \frac{ESS/(n - k)}{ESS/(n - k)} = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Selanjutnya, diperlukan mencari nilai F kritis untuk menentukan apakah terdapat pengaruh secara parsial atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t kritis dapat didapatkan di tabel F dengan melihat nilai degree of freedom (df) numerator = (k-1) dan degree of freedom (df) = (n-k) dengan alpha (0.10) Adapun hipotesis untuk uji t sebagai berikut:

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (Secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh antara

variabel independen terhadap variabel dependen).

$H_a = \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (Secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel

independen terhadap variabel dependen).

Ketika nilai F hitung lebih besar (>) daripada F kritis maka H_0 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya apabila nilai F hitung lebih kecil (<) daripada F kritis maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selain menggunakan nilai F hitung dan F kritis dapat digunakan nilai probabilitas untuk menentukan terdapat pengaruh atau tidak secara bersama-sama variabel independen terhadap dependen, yaitu ketika nilai probabilitas lebih kecil (<) daripada alpha (α) 0.10 maka H_0 diterima. Dan sebaliknya, ketika nilai probabilitas lebih besar (>) daripada alpha (α) 0.10 maka H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menurut Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat (BPS NTB), Provinsi NTB terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yang terletak di dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok terdiri dari Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Pulau Sumbawa terdiri dari kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Dalam penelitian analisis dan pembahasan ini akan memaparkan mengenai pengaruh hotel bintang (HB), hotel non bintang (HNB), restoran (R), biro perjalanan wisata (BPW) dan kendaraan bermotor (KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota NTB. Analisis ini menggunakan data *cross-section* dan *time series* dengan 10 Kabupaten/Kota di NTB pada periode tahun 2011-2019, sehingga total data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 90 data. Dalam penelitian ini, analisis regresi data panel dimulai dengan pemilihan metode yang tepat untuk dijadikan sebagai hasil analisis. Metode tersebut yaitu metode *common effect*, metode *fixed effect*, dan metode *random effect*. Ketiga metode tersebut akan diuji dan dicari model yang paling tepat untuk menjelaskan hasil analisis dari penelitian ini. Uji yang digunakan dalam pemilihan model tersebut yaitu uji chow (uji F), uji LM, dan uji hausman. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat analisis Eviews 12.

4.1 Statistik Deskriptif

Deskriptif data dalam penelitian ini menjelaskan rata-rata, nilai maksimum, dan minimum dari setiap variabel yang digunakan untuk Kabupaten/Kota di NTB. Deskriptif data ini dapat dijelaskan dengan dua tahap yaitu dengan cara deskriptif Provinsi dan deskriptif Kabupaten/Kota.

4.1.1 Statistik Deskriptif Provinsi Nusa Tenggara Barat

Table 4.1 Statistik Deskriptif Provinsi

	<i>Mean</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>
<i>PAD</i>	129.309.733	398.088.461	14.156.544
HB	6,20	28	0
HNB	91,25	583	7
R	139,54	375	13
BPW	39,92	253	0
KB	111.996	351.868	0

*Sumber: BPS dan Satu Data NTB, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, bahwa rata-rata PAD se-Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 129.309.733 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD se-Provinsi NTB sebesar Rp398.088.461 (ribu rupiah) yang berlokasi di Lombok Timur pada tahun 2017. Jumlah minimum PAD se-Provinsi NTB sebesar Rp 14.156.544 (ribu rupiah) yang berlokasi di Kota Bima pada tahun 2012.

Rata-rata jumlah hotel bintang se-Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 6,20 (unit). Jumlah maximum hotel bintang se-Provinsi NTB sebesar 28 (unit) yang berlokasi di Kota Mataram pada tahun 2018. Jumlah minimum hotel bintang se-Provinsi NTB sebesar 0 (unit). Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima tidak memiliki hotel bintang dari tahun 2011 hingga 2019.

Rata-rata jumlah hotel non bintang se-Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 91,25(unit). Jumlah maximum hotel non bintang se-Provinsi NTB sebesar 583 (unit) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2019. Jumlah minimum hotel non bintang se-Provinsi NTB sebesar 7 (unit) yang berlokasi di kabupaten Bima pada tahun 2015,2016 dan 2019.

Rata-rata jumlah restoran se-Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 139,54 (unit). Jumlah maximum restoran se-Provinsi NTB sebesar 375 (unit)

yang berlokasi di Lombok Utara pada tahun 2019. Jumlah minimum restoran se-Provinsi NTB sebesar 13 (unit) yang berlokasi di Kabupaten Dompu pada tahun 2011.

Rata-rata biro perjalanan wisata se-Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 39,92 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata se-Provinsi NTB sebesar 253 (unit) yang berlokasi di Kota Mataram pada tahun 2018. Jumlah minimum biro perjalanan wisata se-Provinsi NTB sebesar 0 (unit) yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor se-Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 111.996 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor se-Provinsi NTB sebesar 351.868 (unit) yang berlokasi di Kota Mataram pada tahun 2019. Jumlah minimum se-Provinsi NTB kendaraan bermotor sebesar 0 (unit).



4.1.2 Statistik Deskriptif Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat

Table 4.2 Statistik Deskriptif Kabupaten/Kota

Kab /Kota	Stat Desk	PAD	HB	HNB	R	BPW	KBM
Lombok Barat	Mean	1.759.96.013,3	23,55	98,77	162,77	94,75	120.582,5
	Min	94.443.831	22	64	113	50	0
	Max	279.318.604	26	167	271	241	219.494
Lombok Tengah	Mean	155.343.991,1	5	79,22	119,88	45,87	207.568,4
	Min	59.233.791	1	43	92	1	136.202
	Max	286.731.417	12	713	271	57	258.264
Lombok Timur	Mean	203.484.447,7	0,62	59,55	171,66	9,12	238.442,3
	Min	56.005.494	0	36	119	6	173.303
	Max	398.088.461	1	143	265	21	315.600
Sumbawa	Mean	132.039.012,6	2,55	36,33	175	1	111.298,6
	Min	61.264.145	1	31	82	1	82.163
	Max	249.526.156	3	53	203	1	131.742
Dompu	Mean	71.704.811,11	0	21,77	30,88	1,5	38.506,25
	Min	26.297.198	0	16	13	1	12.105
	Max	134.347.581	0	35	38	5	46.930
Bima	Mean	102.065.485	0	10,33	32,77	4,14	43.136,13
	Min	43.405.752	0	7	27	0	9.937
	Max	188.203.812	0	14	45	7	115.162
Sumbawa Barat	Mean	73.273.608,11	1,44	28,44	122,55	0	33.092
	Min	27.960.832	1	19	66	0	18.335
	Max	171.632.855	2	39	292	0	51.653
Lombok Utara	Mean	98.781.968	8,33	459,11	299	24,57	34.547,5
	Min	22.406.390	4	275	241	23	0
	Max	185.253.555	13	583	375	29	65.872
Kota Mataram	Mean	249.191.961,3	17,88	102,88	223,33	183,62	213.412
	Min	82.423.869	9	75	177	0	0
	Max	387.757.434	28	172	338	253	351.868
Kota Bima	Mean	31.216.031,78	0	16,11	57,55	15,28	62.449,17
	Min	14.156.544	0	12	31	0	0
	Max	52.465.170	0	18	73	22	136.889

*Sumber: BPS dan Data Satu NTB, data diolah

1. Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 175.996.013,3 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 279.318.604 (ribu rupiah) pada tahun 2019. Jumlah minimum PAD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 94.443.831 (ribu rupiah) pada tahun 2012.

Rata-rata jumlah hotel bintang di Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 23,55 (unit). Jumlah maximum hotel bintang Kabupaten Lombok Barat sebesar 26 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum hotel bintang Kabupaten Lombok Barat sebesar 22 (unit) pada tahun 2014 sampai 2017. Rata-rata jumlah hotel non bintang di Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 98,77 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang Kabupaten Lombok Barat sebesar 167 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum hotel bintang Kabupaten Lombok Barat sebesar 64 (unit) saat tahun 2011 dan 2012.

Rata-rata jumlah restoran di Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 162,77 (unit). Jumlah maximum restoran sebesar 271 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum restoran Kabupaten Lombok Barat sebesar 113 (unit) pada tahun 2011. Rata-rata biro perjalanan wisata di Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 94,75 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata Kabupaten Lombok Barat sebesar 241 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum biro perjalanan wisata Kabupaten Lombok Barat sebesar 50 (unit) pada tahun 2011.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 120.582,5 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor Kabupaten Lombok Barat sebesar 219.494 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum kendaraan bermotor Kabupaten Lombok Barat sebesar 0 (unit).

2. Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 155.343.991,1 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 286.731.417 (ribu rupiah) pada tahun 2017. Jumlah minimum PAD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 59233791 (ribu rupiah) pada tahun 2011.

Rata-rata jumlah hotel bintang di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 5 (unit). Jumlah maximum hotel bintang Kabupaten Lombok Tengah sebesar 12 (unit) pada tahun 2018 dan 2019. Jumlah minimum hotel bintang Kabupaten Lombok Tengah sebesar 1 (unit) saat tahun 2011 dan 2012. Rata-rata jumlah hotel non bintang di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 79,22 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang Kabupaten Lombok Tengah sebesar 713 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum hotel non bintang Kabupaten Lombok Tengah sebesar 43 (unit) pada tahun 2013.

Rata-rata jumlah restoran di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 119,88 (unit). Jumlah maximum restoran Kabupaten Lombok Tengah sebesar 271 (unit) pada tahun 2017. Jumlah minimum restoran Kabupaten Lombok Tengah sebesar 92 (unit) pada tahun 2019. Rata-rata biro perjalanan wisata di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 45,87 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata Kabupaten Lombok Tengah sebesar 57 (unit) pada tahun 2018 dan 2019. Jumlah minimum biro perjalanan wisata Kabupaten Lombok Tengah sebesar 1 (unit) pada tahun 2011.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 207.568,4 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor Kabupaten Lombok Tengah sebesar 258.264 (unit) pada tahun 2013.

Jumlah minimum kendaraan bermotor Kabupaten Lombok Tengah sebesar 136.202 (unit) pada tahun 2011.

3. Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 203.484.447,7 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 398.088.461 (ribu rupiah) pada tahun 2017. Jumlah minimum PAD Kabupaten Lombok Timur sebesar 56.005.494 (ribu rupiah) pada tahun 2011.

Rata-rata jumlah hotel bintang di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 0,62 (unit). Jumlah maximum hotel bintang Kabupaten Lombok Timur sebesar 1 (unit) pada tahun 2015 sampai 2019. Jumlah minimum hotel bintang Kabupaten Lombok Timur sebesar 0 (unit) saat tahun 2011 sampai 2014. Rata-rata jumlah hotel non bintang di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 59,55 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang sebesar 143 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum hotel non bintang sebesar 36 (unit) saat tahun 2011 dan 2012.

Rata-rata jumlah restoran di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 171,66 (unit). Jumlah maximum restoran Kabupaten Lombok Timur sebesar 265 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum restoran Kabupaten Lombok Timur sebesar 119 (unit) pada tahun 2019. Rata-rata biro perjalanan wisata di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 9,12 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata Kabupaten Lombok Timur sebesar 21 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum biro perjalanan wisata Kabupaten Lombok Timur sebesar 6 (unit) pada tahun 2011 sampai 2016.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 238.442,3 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor

Kabupaten Lombok Timur sebesar 315.600 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum kendaraan bermotor Kabupaten Lombok Timur sebesar 173.303 (unit) pada tahun 2011.

4. Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 132.039.012,6 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 249.526.156 (ribu rupiah) pada tahun 2017. Jumlah minimum PAD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 61.264.145 (ribu rupiah).

Rata-rata jumlah hotel bintang di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 2,55 (unit). Jumlah maximum hotel bintang Kabupaten Sumbawa sebesar 3 (unit) pada tahun 2011 dan 2017. Jumlah minimum hotel bintang Kabupaten Sumbawa sebesar 1 (unit) pada tahun 2018 dan 2019. Rata-rata jumlah hotel non bintang di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 36,33 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang Kabupaten Sumbawa sebesar 53 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum hotel bintang Kabupaten Sumbawa sebesar 31 (unit) saat tahun 2011 dan 2012.

Rata-rata jumlah restoran di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 175 (unit). Jumlah maximum restoran Kabupaten Sumbawa sebesar 203 (unit) pada tahun 2011 dan 2012. Jumlah minimum restoran Kabupaten Sumbawa sebesar 82 (unit) pada tahun 2019. Rata-rata biro perjalanan wisata di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 1 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata Kabupaten Sumbawa sebesar 1 (unit). Jumlah minimum biro perjalanan wisata Kabupaten Sumbawa sebesar 1 (unit).

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 111.298,6 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor

Kabupaten Sumbawa sebesar 131.742 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum kendaraan bermotor Kabupaten Sumbawa sebesar 82.163 (unit) pada tahun 2016.

5. Kabupaten Dompu

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kabupaten Dompu dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 71.704.811,11 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kabupaten Dompu sebesar Rp 134.347.581 (ribu rupiah) pada tahun 2017. Jumlah minimum PAD Kabupaten Dompu sebesar Rp 26.297.198 (ribu rupiah) pada tahun 2012.

Bahwa Kabupaten Dompu dari tahun 2011 hingga 2019 tidak memiliki hotel bintang. Kemudian rata-rata jumlah hotel non bintang di Kabupaten Dompu dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 21,77 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang Kabupaten Dompu sebesar 35 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum hotel non bintang Kabupaten Dompu sebesar 16 (unit) saat tahun 2011 dan 2012.

Rata-rata jumlah restoran di Kabupaten Dompu dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 30,88 (unit). Jumlah maximum restoran Kabupaten Dompu sebesar 38 (unit) pada tahun 2013 sampai 2018. Jumlah minimum restoran Kabupaten Dompu sebesar 13 (unit) pada tahun 2011. Rata-rata biro perjalanan wisata di Kabupaten Dompu dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 1,5 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata Kabupaten Dompu sebesar 5 (unit) pada tahun 2012. Jumlah minimum biro perjalanan wisata Kabupaten Dompu sebesar 1 (unit) saat tahun 2011 & 2013 sampai 2019.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Dompu dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 38.506,25 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor Kabupaten Dompu sebesar 46.930 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum kendaraan bermotor Kabupaten Dompu sebesar 12.105 (unit) pada tahun 2011.

6. Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kabupaten Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 102.065.485 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kabupaten Bima sebesar Rp 188.203.812 (ribu rupiah) pada tahun 2017. Jumlah minimum PAD Kabupaten Bima sebesar Rp 43.405.752 (ribu rupiah) pada tahun 2012.

Bahwa Kabupaten Bima dari tahun 2011 hingga 2019 tidak memiliki hotel bintang. Kemudian rata-rata jumlah hotel non bintang di Kabupaten Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 10,33 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang Kabupaten Bima sebesar 14 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum hotel non bintang Kabupaten Bima sebesar 7 (unit) pada tahun 2015,2016 dan 2019.

Rata-rata jumlah restoran di Kabupaten Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 32,77 (unit). Jumlah maximum restoran Kabupaten Bima sebesar 45 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum restoran Kabupaten Bima sebesar 27 (unit) pada tahun 2012. Rata rata biro perjalanan wisata di Kabupaten Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 4,14 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata Kabupaten Bima sebesar 7 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum biro perjalanan wisata Kabupaten Bima sebesar 0 (unit) pada tahun 2012.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 43.136,13 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor Kabupaten Bima sebesar 115.162 (unit) pada tahun 2011. Jumlah minimum kendaraan bermotor Kabupaten Bima sebesar 9.937 (unit) pada tahun 2012.

7. Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 73.273.608,11 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp 171.632.855 (ribu rupiah) pada tahun 2017. Jumlah minimum PAD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp 27.960.832 (ribu rupiah) pada tahun 2011.

Rata-rata jumlah hotel bintang di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 1,44 (unit). Jumlah maximum hotel bintang Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 2 (unit) pada tahun 2015 sampai 2018. Jumlah minimum hotel bintang Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 1 (unit) pada tahun 2011 sampai 2014 dan 2019. Rata-rata jumlah hotel non bintang di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 28,44 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 39 (unit) pada 2018. Jumlah minimum hotel non bintang Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 19 (unit) pada tahun 2015 dan 2016.

Rata-rata jumlah restoran di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 122,55 (unit). Jumlah maximum restoran sebesar 292 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum restoran Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 66 (unit) pada tahun 2011 dan 2012. Bahawa biro perjalanan wisata di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2011 hingga 2019 masih belum memiliki biro perjalanan wisata.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa Barat Barat dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 33.092 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 51.653 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum kendaraan bermotor Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 18.335 (unit) pada tahun 2013.

8. Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 98.781.968 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp 185.253.555 (ribu rupiah) pada tahun 2019. Jumlah minimum PAD Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp 22.406.390 (ribu rupiah) pada tahun 2011.

Rata-rata jumlah hotel bintang di Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 8,33 (unit). Jumlah maximum hotel bintang Kabupaten Lombok Utara sebesar 13 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum hotel bintang Kabupaten Lombok Utara sebesar 4 (unit) saat tahun 2011 dan 2012. Rata-rata jumlah hotel non bintang di Kabupaten Lombok Utara sebesar 459,11 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang Kabupaten Lombok Utara sebesar 583 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum hotel non bintang Kabupaten Lombok Utara sebesar 275 (unit) pada tahun 2013.

Rata-rata jumlah restoran di Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 299 (unit). Jumlah maximum restoran Kabupaten Lombok Utara sebesar 375 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum restoran Kabupaten Lombok Utara sebesar 241 (unit) pada tahun 2019. Rata-rata biro perjalanan wisata di Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 24,57 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata Kabupaten Lombok Utara sebesar 29 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum biro perjalanan wisata Kabupaten Lombok Utara sebesar 23 (unit) pada tahun 2019.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 34.547,5 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor Kabupaten Lombok Utara sebesar 65.872 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum kendaraan bermotor Kabupaten Lombok Utara sebesar 0 (unit).

9. Kota Mataram

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kota Mataram dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 249.191.961,3 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kota Mataram sebesar Rp 387.757.434 (ribu rupiah) pada tahun 2017. Jumlah minimum PAD Kota Mataram sebesar Rp 82.423.869 (ribu rupiah) pada tahun 2011.

Rata-rata jumlah hotel bintang di Kota Mataram dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 17,88 (unit). Jumlah maximum hotel bintang Kota Mataram sebesar 28 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum hotel bintang Kota Mataram sebesar 9 (unit) saat tahun 2011 dan 2012. Rata-rata jumlah hotel non bintang di Kabupaten Kota Mataram dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 102,88 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang Kota Mataram sebesar 172 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum hotel non bintang Kota Mataram sebesar 75 (unit) saat tahun 2011 dan 2012.

Rata-rata jumlah restoran di Kota Mataram dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 223,33 (unit). Jumlah maximum restoran Kota Mataram sebesar 338 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum restoran Kota Mataram sebesar 177 (unit) pada tahun 2011 dan 2012. Rata-rata biro perjalanan wisata di Kota Mataram dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 183,62 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata Kota Mataram sebesar 253 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum biro perjalanan wisata Kota Mataram sebesar 0 (unit) pada tahun 2019.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kota Mataram dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 213.412 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor Kota Mataram sebesar 351.868 (unit) pada tahun 2019. Jumlah minimum kendaraan bermotor Kota Mataram sebesar 0 (unit).

10. Kota Bima

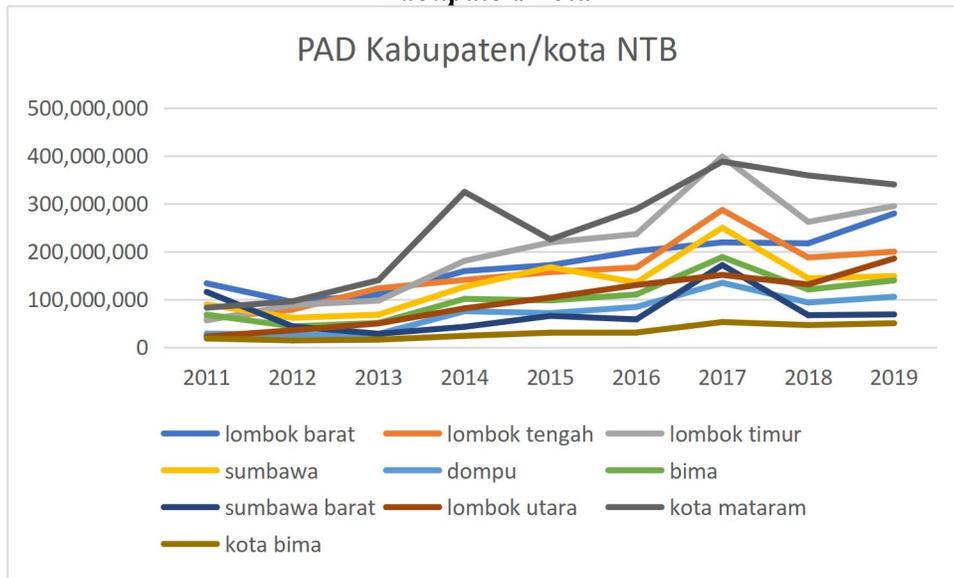
Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, bahwa jumlah rata-rata PAD di Kota Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 31.216.031,78 (ribu rupiah). Jumlah maximum PAD Kota Bima sebesar Rp 52.465.170 (ribu rupiah) pada tahun 2017. Jumlah minimum PAD Kota Bima sebesar Rp 14.156.544 (ribu rupiah) pada tahun 2012.

Hotel bintang di Kota Bima dari tahun 2011 hingga 2019 bahwa tidak memiliki hotel bintang. Kemudian rata-rata jumlah hotel non bintang di Kota Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 16,11 (unit). Jumlah maximum hotel non bintang Kota Bima sebesar 18 (unit) saat tahun 2013 & 2014 dan 2017 & 2018. Jumlah minimum hotel non bintang Kota Bima sebesar 12 (unit) saat tahun 2011 dan 2012.

Rata-rata jumlah restoran di Kota Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 57,55 (unit). Jumlah maximum restoran Kota Bima sebesar 73 (unit) pada tahun 2013 sampai 2016. Jumlah minimum restoran Kota Bima sebesar 31 (unit) pada tahun 2011 dan 2012. Rata-rata biro perjalanan wisata di Kota Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 15,28 (unit). Jumlah maximum biro perjalanan wisata Kota Bima sebesar 22 (unit) pada tahun 2018. Jumlah minimum biro perjalanan wisata Kota Bima sebesar 0 (unit) pada tahun 2019.

Rata-rata jumlah kendaraan bermotor di Kota Bima dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar 62.449,17 (unit). Jumlah maximum kendaraan bermotor Kota Bima sebesar 136.889 (unit) pada tahun 2013. Jumlah minimum kendaraan bermotor Kota Bima sebesar 0 (unit) pada tahun 2015.

**Gambar 4.1 PAD
Kabupaten/Kota**



Sumber: BPS NTB, data diolah

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang mencakup dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2011 hingga 2019. Berdasarkan grafik di atas, secara keseluruhan PAD se-Kabupaten/Kota NTB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 PAD se-kabupaten/Kota NTB Menurun, kemudian dari tahun 2012 hingga 2017 PAD se-Kabupaten/Kota NTB mengalami tren peningkatan, hanya saja peningkatan PAD Kota Mataram mengalami peningkatan drastis pada tahun 2014. Yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga memengaruhi inflasi sebesar 7,18 (persen). Namun pada tahun 2015 PAD menurun, tetapi meskipun menurun PAD kota mataram masih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini karena Kota Mataram merupakan Ibukota Provinsi NTB yang berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan. Kemudian

Kota Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis yang berada di wilayah Pasar Mandalika Bertais dan wilayah Cakranegara, selain itu di Kota Mataram juga memiliki seperti Mataram *Mall*, Lombok *Epicentrum Mall*, Transmart *Mall* dan *supermarket* lainnya.

Penurunan PAD Kabupaten/Kota NTB pada tahun 2018 disebabkan oleh bencana gempa bumi yang menyebabkan menurunnya kontribusi terhadap sektor pariwisata. Disamping itu, penurunan PAD ini tidak terlepas dari merosotnya penerimaan dividen (laba) dari investasi permanen pemda pada BUMD maupun perusahaan lain (Gatra.com, 2019). Hal ini pada tahun 2017 penerimaan mencapai sebesar Rp 163 852 468 (ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2018 penerimaan hanya sebesar Rp 60 080 960 (ribu rupiah). Artinya Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan pada tahun 2018 menurun sebesar -63,3 (persen).

Rata-rata jumlah PAD paling tinggi ke-dua yaitu Kabupaten Lombok Timur di bawah Kota Mataram, pada tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur memiliki PAD paling tinggi se-Kabupaten/Kota NTB. Hal ini karena Lombok Timur yang merupakan dengan jumlah penduduk terbesar di NTB sebesar 1.183.2014 (jiwa) tercatat pada tahun 2017. Selain itu potensi yang dimiliki Lombok Timur yakni pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan Pariwisata dan kebudayaan.

4.2 Hasil Analisis Penelitian

4.2.1 Hasil Regresi Data Panel Ketiga Model

Table 4.3 Hasil regresi data panel dengan model common effect, fixed effect, random effect

Variabel Independen	Model Common Effect		Model Fixed Effect		Model Random Effect	
	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.
C	43366525	0,0005	56469910	0,0053	18247431	0,0072
HB	2838590	0,0169	-368940,9	0,8807	24773795	0,0966
HNB	48408.25	0,4716	332759.7	0,0291	146460,1	0,1054
R	26943.31	0,7939	-78660.05	0,5710	-82287,15	0,4885
BPW	222083.3	0,0961	97933.24	0,4950	187712,0	0,1448
KB	512.0679	0,0000	517.6648	0,0000	530,4441	0,0000
R-Squared	0,745027		0,854212		0,597569	
Adjusted R-Squared	0,721418		0,808856		0,560307	
Prob (F-statistic)	0,000000		0.000000		0,000000	

*Sumber: Hasil pengolahan data Eviews 12

4.2.2 Pemilihan Model Yang Tepat

4.2.2.1 Uji chow

Uji chow digunakan untuk memilih antara model *common effect* dengan model *fixed effect*.

H0 = Tidak ada perbedaan dalam intercept (Model *common effect*)

Ha = Terdapat perbedaan dalam intercept (Model *fixed effect*)

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (*p-value*) untuk menentukan manakah model yang tepat untuk analisis pada penelitian ini. Apabila nilai Prob. $< \alpha$ (0.10) maka menolak H0, artinya model *fixed effect* yang tepat. Sebaliknya, apabila nilai Prob. $> \alpha$ (0.10) maka gagal menolak H0, artinya model *common effect* yang tepat.

Table 4.4 Uji Chow

Redundant Fixed Effect Tests			
Equation: FE			
Test cross-section fixed effects			
Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	3,744652	(9,35)	0,0014
Cross-section chi-square	33,540264	9	0,0001

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews 12

Didapatkan nilai Prob. Cross-section F $0.0014 < 0.10$ alpha maka menolak H0. Artinya model yang tepat yaitu model *fixed effect*.

4.2.2.2 Uji Hausman

Berdasarkan hasil dari uji chow bahwa model yang tepat merupakan model *fixed effect*, maka langkah selanjutnya yaitu memilih antara model *random effect* dengan model *fixed effect* menggunakan uji hausman.

H0 = Model *random effect*

Ha = Model *fixed effect*

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (*p-value*) untuk menentukan manakah model yang tepat untuk analisis pada penelitian ini. Apabila

nilai Prob. $< \alpha$ (0.10) maka menolak H_0 , artinya model *fixed effect* yang tepat. Sebaliknya, apabila nilai Prob. $> \alpha$ (0.10) maka gagal menolak H_0 , artinya model *random effect* yang tepat.

Table 4.5 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	4,380597	5	0,4960

*Sumber: Eviews 12, data diolah

Didapatkan nilai Prob. *Cross-section random* 0.4960 $> \alpha$ (0.10) maka gagal menolak H_0 . Artinya model yang tepat yaitu model *random effect*.

4.2.2.3 Uji LM

Berdasarkan hasil dari uji hausman bahwa model yang tepat merupakan model *random effect*, maka langkah keputusan akhir selanjutnya yaitu memilih antara model *random effect* dengan model *common effect* menggunakan uji LM. Dimana salah satu fungsi atau kegunaannya uji LM adalah untuk menentukan estimasi terbaik, apakah menggunakan random effect atau tidak.

H_0 = Model common effect

H_a = Model random effect

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas Breusch-Pagan (*p-value*) untuk menentukan manakah model yang tepat untuk analisis pada penelitian ini. Apabila nilai Prob. $< \alpha$ (0.10) maka menolak H_0 , artinya model *random effect* yang tepat. Sebaliknya, apabila nilai Prob. $> \alpha$ (0.10) maka gagal menolak H_0 , artinya model *common effect* yang tepat.

Table 4.6 Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypothesis: No Effects			
Alternative hypothesis: two sided (Breusch-Pagan) and one sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-Section	Time	Both
Breusch-Pagan	7.279606	11,99101	19,27061
	(0,0070)	(0,0005)	(0,0000)

*Sumber: Hasil pengolahan data Eviews 12

Didapatkan nilai Probabilitas Breusch-Pagan $0.0070 < \alpha (0.10)$ maka menolak H_0 . Artinya model yang tepat yaitu model *Random effect*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model (Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect), Random Effect lebih baik dalam menginterpretasikan regresi data panel.

4.2.3 Uji Statistik Dengan Random Effect

$$\ln PADit = \beta_0 + \beta_1 \ln HBit + \beta_2 \ln HNBit + \beta_3 \ln Rit + \beta_4 \ln BPWit + \beta_5 \ln KBit + \epsilon_i$$

4.2.3.1 Hasil regresi Model Random Effect

Table 4.7 Random Effect

Variabel-variabel	Coeff.	Prob.		
C	18247431	0,0072		
HB	24773795	0,0966		
HNB	146460,1	0,1054		
R	-82287,15	0,4885	R-Squared	0,597569
BPW	187712,0	0,1448	Adjusted R-Squared	0,560307
KB	530,4441	0,0000	Prob (F-statistic)	0,000000

*Sumber: Hasil pengolahan data Eviews 12

Berdasarkan hasil tabel di atas maka persamaan regresinya data panel adalah sebagai berikut:

$$PAD = 18247431 + 24773795HB + 146460,1HNB - 82287,15R + 187712BPW + 530,4441KB$$

4.2.3.2 Koefisien Determinasi (R²)

Didapatkan nilai R² sebesar 0,597569. Artinya variabel PAD dipengaruhi oleh variabel-variabel: Hotel Bintang, Hotel non Bintang, Restoran, Biro Perjalanan Wisata dan Kendaraan Bermotor sebesar 59,75% dan sisanya sebesar 40,25% dijelaskan oleh variabel lain di luar model tersebut.

4.2.3.3 Uji Parsial (Uji T)

Dalam penelitian ini menggunakan alpha (α) atau tingkat kesalahan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%.

1. Pengaruh (HB) Hotel Bintang terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Didapatkan nilai koefisien regresi 24773795 dan Prob. $0,0966 < \alpha$ (0.10) maka artinya variabel HB mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada alpha 10% terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.

2. Pengaruh HNB (Hotel non Bintang) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Didapatkan nilai koefisien regresi 146460,1 dan Prob. $0,8515 > \alpha$ (0.10) maka artinya variabel HNB tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada alpha 10% terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.

3. Pengaruh R (Restoran) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Didapatkan nilai koefisien regresi -82287,15 dan Prob. $0,4885 > \alpha$ (0.10) maka artinya variabel R tidak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada alpha 10% terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.

4. Pengaruh BPW (Biro Perjalanan Wisata) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Didapatkan nilai koefisien regresi 187712,0 dan Prob. $0,1448 > \alpha$ (0.10) maka artinya variabel BPW tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada alpha 10% terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.

5. Pengaruh KB (Kendaraan Bermotor) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Didapatkan nilai koefisien regresi 530,4441 dan Prob. $0,000 < \alpha$ (0.10) maka artinya variabel KB mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada alpha 10% terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.

4.2.3.4 Uji Bersama-Sama (Uji F)

Dalam penelitian ini menggunakan alpha (α) atau tingkat kesalahan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%. Didapatkan nilai Prob (F-statistic) $0,000000 < \alpha$ (0.10) maka artinya jumlah variabel-variabel: Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, Restoran, Biro Perjalanan Wisata dan Kendaraan Bermotor secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB.

4.2.4 Pembahasan

4.2.4.1 Pengaruh Hotel Bintang Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Hotel Bintang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Koefisien variabel Hotel Bintang sebesar 24773795 artinya jika variabel jumlah Hotel Bintang mengalami peningkatan 1 (unit), maka PAD di Kabupaten/Kota NTB akan mengalami peningkatan sebesar Rp 24.773.795 (ribu rupiah).

Bertambahnya jumlah pembangunan hotel bintang, maka hal tersebut dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan pajaknya. Sanjaya (2020), mengatakan di sisi lain keberadaan hotel bintang secara tidak langsung dapat membantu bagi daerah untuk melaksanakan *event* tertentu dan ini menjadi *linkage* untuk berbagai sektor yang akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

4.2.4.2 Pengaruh Hotel non Bintang Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah Hotel non Bintang tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Hal ini disebabkan oleh hotel non bintang di Kabupaten/Kota NTB yang memiliki fasilitas di bawah standar hotel bintang 1 (satu), tentu hal tersebut yang menyebabkan harga hotel non bintang menjadi relatif murah. Artinya harga yang relatif murah tentu pajak yang diterima dari Hotel non bintang menjadi sedikit dibandingkan dengan hotel bintang. Meskipun jumlah hotel non bintang lebih banyak daripada hotel bintang, ternyata tidak banyak berdampak terhadap PAD.

4.2.4.3 Pengaruh Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah Restoran tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Hal tersebut dimungkinkan karena tidak banyak konsumen wisatawan maupun

warga lokal yang menikmati makanan dan minuman di restoran, sehingga kurang mempengaruhi PAD yang diterima oleh Kabupaten/Kota NTB.

4.2.4.4 Pengaruh Biro Perjalanan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah biro perjalanan wisata menyatakan tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Lantaran hal ini pelaku usaha biro perjalanan wisata paling banyak hanya berada di Kota Mataram dengan rata-rata 183.625 (unit). Sementara itu rata-rata biro perjalanan wisata se-Kabupaten/Kota NTB hanya sebesar 139 (unit). Artinya masih kebanyakan pelaku usaha biro perjalanan wisata masih berada di Ibukota Provinsi NTB. Di sisi lain bisa juga disebabkan wisatawan asing maupun wisatawan domestik tidak banyak yang menggunakan jasa biro perjalanan wisata tersebut.

4.2.4.5 Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap PAD. Koefisien variabel jumlah kendaraan bermotor sebesar 530,4441 artinya jika variabel jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan 1 (unit) maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar Rp 530,4441 ribu rupiah.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya membuktikan masyarakat Kabupaten/Kota NTB menggunakan kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tiap tahun akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang berarti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh Hotel Bintang, Hotel non Bintang, Restoran, Biro Perjalanan Wisata dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat Periode 2011-2019. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata PAD se-Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2019 sebesar Rp 129.309.733 (ribu rupiah), adapun rata rata PAD dari tahun 2011 hingga 2019 yang melebihi provinsi yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa dan Kota Mataram. Jumlah maximum PAD se-Provinsi NTB sebesar Rp398.088.461 (ribu rupiah) yang berlokasi di Lombok Timur pada tahun 2017. Hal ini karena Lombok Timur yang merupakan dengan jumlah penduduk terbesar di NTB sebesar 1.183.2014 (jiwa) tercatat pada tahun 2017. Selain itu potensi yang dimiliki Lombok Timur yakni pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan Pariwisata dan kebudayaan. Jumlah minimum PAD se-Provinsi NTB sebesar Rp 14.156.544 (ribu rupiah) yang berlokasi di Kota Bima pada tahun 2012.
2. Variabel jumlah hotel bintang mempunyai pengaruh Positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten/Kota NTB, hal ini berarti pada saat terjadi penambahan pembangunan 1 (unit) hotel Bintang maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp 24.773.795 (ribu rupiah). Hal ini Pemerintah Daerah perlu mendorong kemudahan dalam perizinan pembangunan hotel berbintang dan peraturan daerah terkait, serta peran dukungan masyarakat setempat. Disamping itu perlunya pemerintah mendorong pelaku usaha hotel non

bintang menjadi hotel berbintang, hal tersebut berkaitan dengan pengaruh hotel non bintang dalam model regresi data panel.

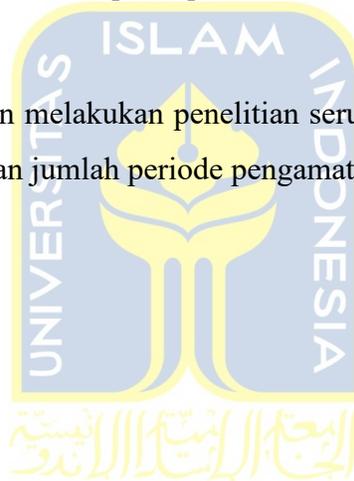
3. Variabel jumlah hotel non bintang tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Pada Hotel non Bintang memiliki fasilitas standar di bawah hotel bintang dengan harga Hotel non Bintang, menjadi relatif murah dibandingkan Hotel Berbintang, yang menyebabkan jumlah tamu hotel yang menginap sedikit dan pajak hotel menjadi relatif sedikit juga.
4. Variabel jumlah restoran tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Hal tersebut dimungkinkan karena tidak banyak konsumen yang menikmati makanan dan minuman di restoran, sehingga kurang mempengaruhi PAD yang diterima oleh Kabupaten/Kota NTB.
5. Variabel jumlah biro perjalanan wisata tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Hal ini disebabkan pelaku usaha biro perjalanan wisata paling banyak hanya berada di Kota Mataram.
6. Variabel jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota NTB. Hal ini berarti pada saat terjadi penambahan 1 (unit) kendaraan bermotor maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp 530,444 (ribu rupiah). Hal ini dikarenakan hasil PAD yang bersumber dari Pajak kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang berarti.
7. Secara simultan Bahwa variabel-variabel: jumlah Hotel Bintang, jumlah Hotel non Bintang, jumlah restoran, jumlah Biro perjalanan wisata, dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap PAD Kabupaten/Kota NTB.

5.2 Saran

1. Adanya pengaruh hotel berbintang yang berkontribusi positif terhadap PAD, sementara hotel non bintang tidak signifikan memberikan kontribusi terhadap PAD maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebaiknya memberikan

perizinan sebanyak-banyaknya untuk hotel bintang. Daripada hotel non bintang.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota NTB untuk membantu pelaku usaha hotel non bintang untuk meningkatkan kelas minimal menjadi hotel bintang 1 (satu), disamping itu pelaku usaha hotel non bintang untuk mencari dana dari investor.
3. Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota NTB perlu tetap mengawal pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan ketat, agar target setiap tahun pendapatan di Kabupaten/Kota NTB dapat tetap terjaga.
4. Peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa disarankan untuk menambah jumlah variabel dan jumlah periode pengamatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*
- Agustri, N. (2011), *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat (1979-2008)*. thesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas: Padang.,
- Al Bataafi, Wisnu. (2006). *House Keeping Departement, Floor and Public Area*. Bandung. Alfabeta.
- Antaranews.com, (2019), Pertumbuhan Ekonomi Mataram turun Akibat Gempa, Diambil Agustus 2021, <https://www.antaranews.com/berita/816708/laju-pertumbuhan-ekonomi-mataram-turun-akibat-gempa>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* (Doctoral dissertation, Udayana University). *E-Jurnal Manajemen 7.2* (2018): 1080-1110
- Asworowati, R. (2017). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Studi Kasus Di Bali, DIY, NTB dan SUMUT*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2020) *Statistik Perhotelan NTB, Nusa Tenggara Barat*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *NTB Dalam Angka Tahun 2012 – 2020*, Nusa Tenggara Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Statistik Keuangan Daerah NTB 2012 – 2019*, Nusa Tenggara Barat
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Pariwisata dan tujuan berkelanjutan. Nusa Tenggara Barat: BPS Nusa Tenggara Barat*
- Bagyono, (2005), *Pengetahuan Dasar Pariwisata & Perhotelan*, Alfabet: Bandung
- Bappeda Kabupaten Lombok Timur, *Potensi Lombok Timur*, Diambil Agustus 2021, Dari <https://bappeda.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-201-potensi-lombok-timur.html>
- Dinas Perhubungan Provinsi NTB. (Profil). KEK Mandalika, diakses 6 Mei 2021, <https://dishub.ntbprov.go.id/kek-the-mandalika/>
- Firdausy, Carunia Mulia, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017
- Gatra.com, (2019), *Kinerja PAD NTB Terburuk Selama 2018*, diambil Agustus 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/410504/politik/kinerja-pad-ntb-terburuk-selama-tahun-2018>
- Kamalia, N. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, Universitas Ahmad Dahlan)
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Nisak, I. C., & Prakoso, B. S. (2015). Kajian Pertambahan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tingkat Pelayanan Jalan di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(4)
- Pangestu, W., Widodo, A. W., & Rahayudi, B. (2018). Prediksi Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menggunakan Metode Average-Based Fuzzy Time Series Models. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN*, 2548, 964X.
- Paramacintya, N., & Sri Budhi, M. (2018). PENGARUH JUMLAH BIRO PERJALANAN WISATA, JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DAN PAJAK HOTEL RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 184-211. Retrieved from
- Pendit, Nyoman S. (2003). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha
- PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No.11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
- Prawita, R.N. (2018), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016." Skripsi Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sanjaya, S., & Wijaya, R. A. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 559-568
- Santi, D.K. (2018), "KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016". Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.
- SATU DATA NTB, *Jumlah Restoran dan Tenaga Kerja pada Restoran di Provinsi NTB Tahun 2018-2019*, Nusa Tenggara Barat, <https://data.ntbprov.go.id/>
- SATU DATA NTB, *Jumlah Usaha Pariwisata di Provinsi NTB 2018-2019*, Nusa Tenggara Barat, <https://data.ntbprov.go.id/>

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017). Pesona Indonesia/Wonderful Indonesia: Inspirasi di balik Jenama Pariwisata Indonesia. Diambil 6 Mei 2021, <https://setkab.go.id/pesona-indonesiawonderful-indonesia-inspirasi-di-balik-jenama-pariwisata-indonesia/>
- Siahaan, Marihot P. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (1). Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Simangunsong, B. Y. P. (2014). *Analisis komponen tingkat kemampuan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, UNIMED)
- Sriyana, J. 2014. Metode Regresi Data Panel. Yogyakarta: EKONISIA
- Undang-Undang No 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN



LAMPIRAN

Lampiran I: Data Penelitian

Tahun	Kabupaten/Kota	PAD (Ribuan Rupiah)	HB	HNB	R	BPW	KB
2011	Lombok Barat	133,284,360	22	64	113	50	
2012	Lombok Barat	94,443,831	22	64	115	61	
2013	Lombok Barat	110062022	26	67	150	61	0
2014	Lombok Barat	159069267	26	84	150	61	
2015	Lombok Barat	171405340	22	84	150	61	0
2016	Lombok Barat	200549255	22	84	150	61	126024
2017	Lombok Barat	218910162	22	126	115		180966
2018	Lombok Barat	216921279	26	149	271	241	197011
2019	Lombok Barat	279318604	24	167	251	162	219494
2011	Lombok Tengah	59,233,791	1	45	101	1	136202
2012	Lombok Tengah	78,444,760	1	45	101	47	
2013	Lombok Tengah	123011378	2	43	97	52	258264
2014	Lombok Tengah	140507906	2	46	97	51	216420
2015	Lombok Tengah	156931858	5	81	97	51	216420
2016	Lombok Tengah	166416246	5	81	97	51	149801
2017	Lombok Tengah	286731417	5	94	271		209353
2018	Lombok Tengah	187324324	12	105	126	57	224377
2019	Lombok Tengah	199494240	12	173	92	57	249710
2011	Lombok Timur	56,005,494	0	36	141	6	173303
2012	Lombok Timur	88,007,658	0	36	129	6	
2013	Lombok Timur	97249109	0	49	188	6	214956
2014	Lombok Timur	180308182	0	49	188	6	239407
2015	Lombok Timur	218906904	1	41	188	6	239407

Tahun	Kabupaten/Kota	PAD (Ribu Rupiah)	HB	HNB	R	BPW	KB
2016	Lombok Timur	236147475	1	41	188	6	180831
2017	Lombok Timur	398088461	1	55	139		259753
2018	Lombok Timur	261716110	1	143	265	21	284281
2019	Lombok Timur	294930636	1	86	119	16	315600
2011	Sumbawa	89,055,716	3	31	203		88117
2012	Sumbawa	61,264,145	3	31	203	1	
2013	Sumbawa	67871443	3	33	176	1	108714
2014	Sumbawa	126129384	3	33	177	1	125564
2015	Sumbawa	166992683	3	33	177	1	125564
2016	Sumbawa	135182853	3	33	177	1	82163
2017	Sumbawa	249526156	3	39	180		109139
2018	Sumbawa	143943920	1	53	200	1	119386
2019	Sumbawa	148384813	1	41	82	1	131742
2011	Dompu	28,333,784	0	16	13	1	12105
2012	Dompu	26297198	0	16	15	5	
2013	Dompu	27595033	0	24	38	1	41989
2014	Dompu	75094876	0	24	38	1	45014
2015	Dompu	71079760	0	17	38	1	45104
2016	Dompu	84012461	0	17	38	1	31299
2017	Dompu	134347581	0	24	38		42124
2018	Dompu	93289124	0	35	38	1	43485
2019	Dompu	105293483	0	23	22	1	46930
2011	Bima	67,880,379	0	11	28		115162
2012	Bima	43405752	0	11	27	0	
2013	Bima	50667887	0	12	32	4	9937
2014	Bima	100899000	0	12	32	4	19668

Tahun	Kabupaten/Kota	PAD (Ribuan Rupiah)	HB	HNB	R	BPW	KB
2015	Bima	97589698	0	7	32	4	19668
2016	Bima	110079232	0	7	32	4	45792
2017	Bima	188203812	0	12	35		42105
2018	Bima	120342973	0	14	45	6	44373
2019	Bima	139520632	0	7	32	7	48384
2011	Sumbawa Barat	115,384,260	1	27	66		33289
2012	Sumbawa Barat	43,405,752	1	27	66	0	
2013	Sumbawa Barat	27960832	1	34	120	0	18335
2014	Sumbawa Barat	42509446	1	34	120	0	20549
2015	Sumbawa Barat	65369027	2	19	120	0	20549
2016	Sumbawa Barat	57982409	2	19	120	0	29387
2017	Sumbawa Barat	171632855	2	30	125		43632
2018	Sumbawa Barat	66810358	2	39	292	0	47342
2019	Sumbawa Barat	68407534	1	27	74	0	51653
2011	Lombok Utara	22,406,390	4	427	281		
2012	Lombok Utara	35239930	4	427	281	24	
2013	Lombok Utara	49619935	6	275	308	24	0
2014	Lombok Utara	81090502	6	515	308	24	
2015	Lombok Utara	103652231	10	484	308	24	0
2016	Lombok Utara	129750830	10	484	308	24	34370
2017	Lombok Utara	150949370	10	371	281		50422
2018	Lombok Utara	131074969	13	566	375	29	56621
2019	Lombok Utara	185253555	12	583	241	23	65872
2011	Kota Mataram	82,423,869	9	75	177	117	
2012	Kota Mataram	95,877,365	9	75	177	223	
2013	Kota Mataram	139877150	12	80	196	219	0

Tahun	Kabupaten/Kota	PAD (Ribu Rupiah)	HB	HNB	R	BPW	KB
2014	Kota Mataram	324539561	12	76	196	219	146144
2015	Kota Mataram	225076429	22	100	196	219	146144
2016	Kota Mataram	288415927	22	100	196	219	214572
2017	Kota Mataram	387757434	22	126	272		307247
2018	Kota Mataram	358825822	28	122	338	253	327909
2019	Kota Mataram	339934095	25	172	262	0	351868
2011	Kota Bima	18,047,845	0	12	31		
2012	Kota Bima	14156544	0	12	31	9	
2013	Kota Bima	15691113	0	18	73	19	136889
2014	Kota Bima	23665602	0	18	73	19	
2015	Kota Bima	30266723	0	16	73	19	0
2016	Kota Bima	30524800	0	16	73	19	33189
2017	Kota Bima	52465170	0	18	66		50878
2018	Kota Bima	46115437	0	18	66	22	73538
2019	Kota Bima	50011052	0	17	32	0	80201

*Sumber: BPS NTB dan Satu Data NTB

Lampiran II: Common Effect

Dependent Variable: PAD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/07/21 Time: 14:34
 Sample: 2011 2019
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 10
 Total panel (unbalanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43366525	11709956	3.703389	0.0005
HB	2838590.	1151924.	2.464218	0.0169
HNB	48408.25	66770.29	0.724997	0.4716
R	26943.31	102610.1	0.262579	0.7939
BPW	222083.3	131130.6	1.693605	0.0961
KB	512.0679	67.90279	7.541191	0.0000
R-squared	0.745027	Mean dependent var	1.34E+08	
Adjusted R-squared	0.721418	S.D. dependent var	85416194	
S.E. of regression	45083370	Akaike info criterion	38.18056	
Sum squared resid	1.10E+17	Schwarz criterion	38.39000	
Log likelihood	-1139.417	Hannan-Quinn criter.	38.26249	
F-statistic	31.55744	Durbin-Watson stat	0.993348	
Prob(F-statistic)	0.000000			



Lampiran III: Fixed Effect

Dependent Variable: PAD
Method: Panel Least Squares
Date: 08/07/21 Time: 14:35
Sample: 2011 2019
Periods included: 7
Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56469910	19270620	2.930363	0.0053
HB	-368940.9	2443671.	-0.150978	0.8807
HNB	332759.7	147602.6	2.254429	0.0291
R	-78660.05	137823.0	-0.570732	0.5710
BPW	97933.24	142341.4	0.688016	0.4950
KB	517.6648	113.2021	4.572924	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.854212	Mean dependent var	1.34E+08
Adjusted R-squared	0.808856	S.D. dependent var	85416194
S.E. of regression	37343991	Akaike info criterion	37.92156
Sum squared resid	6.28E+16	Schwarz criterion	38.44515
Log likelihood	-1122.647	Hannan-Quinn criter.	38.12636
F-statistic	18.83340	Durbin-Watson stat	1.482779
Prob(F-statistic)	0.000000		

الجامعة الإسلامية

Lampiran IV :Random Effect

Dependent Variable: PAD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/07/21 Time: 14:35
 Sample: 2011 2019
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 10
 Total panel (unbalanced) observations: 60
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50999502	18247431	2.794887	0.0072
HB	2473795.	1462989.	1.690919	0.0966
HNB	146460.1	88937.67	1.646772	0.1054
R	-82287.15	117989.1	-0.697413	0.4885
BPW	187712.0	126872.0	1.479539	0.1448
KB	530.4441	85.30905	6.217911	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		34273833	0.4572
Idiosyncratic random		37343991	0.5428

Weighted Statistics			
R-squared	0.597569	Mean dependent var	54068044
Adjusted R-squared	0.560307	S.D. dependent var	56016539
S.E. of regression	37201726	Sum squared resid	7.47E+16
F-statistic	16.03692	Durbin-Watson stat	1.360918
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.728926	Mean dependent var	1.34E+08
Sum squared resid	1.17E+17	Durbin-Watson stat	0.871630

Lampiran V: Uji chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FE
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.744652	(9,45)	0.0014
Cross-section Chi-square	33.540264	9	0.0001

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PAD
Method: Panel Least Squares
Date: 08/07/21 Time: 14:41
Sample: 2011 2019
Periods included: 7
Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43366525	11709956	3.703389	0.0005
HB	2838590.	1151924.	2.464218	0.0169
HNB	48408.25	66770.29	0.724997	0.4716
R	26943.31	102610.1	0.262579	0.7939
BPW	222083.3	131130.6	1.693605	0.0961
KB	512.0679	67.90279	7.541191	0.0000

R-squared	0.745027	Mean dependent var	1.34E+08
Adjusted R-squared	0.721418	S.D. dependent var	85416194
S.E. of regression	45083370	Akaike info criterion	38.18056
Sum squared resid	1.10E+17	Schwarz criterion	38.39000
Log likelihood	-1139.417	Hannan-Quinn criter.	38.26249
F-statistic	31.55744	Durbin-Watson stat	0.993348
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran VI: Uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.380597	5	0.4960

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
HB	-368940....	2473795.4...	38311918...	0.1464
HNB	332759.6...	146460.07...	13876632...	0.1138
R	-78660.0...	-82287.14...	50737423...	0.9594
BPW	97933.23...	187711.98...	41645854...	0.1642
KB	517.664783	530.444116	5537.090799	0.8636

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PAD

Method: Panel Least Squares

Date: 08/07/21 Time: 14:45

Sample: 2011 2019

Periods included: 7

Cross-sections included: 10

Total panel (unbalanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56469910	19270620	2.930363	0.0053
HB	-368940.9	2443671.	-0.150978	0.8807
HNB	332759.7	147602.6	2.254429	0.0291
R	-78660.05	137823.0	-0.570732	0.5710
BPW	97933.24	142341.4	0.688016	0.4950
KB	517.6648	113.2021	4.572924	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.854212	Mean dependent var	1.34E+08
Adjusted R-squared	0.808856	S.D. dependent var	85416194
S.E. of regression	37343991	Akaike info criterion	37.92156
Sum squared resid	6.28E+16	Schwarz criterion	38.44515
Log likelihood	-1122.647	Hannan-Quinn criter.	38.12636
F-statistic	18.83340	Durbin-Watson stat	1.482779
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran VII: Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	7.279606 (0.0070)	11.99101 (0.0005)	19.27061 (0.0000)
Honda	2.698075 (0.0035)	3.462803 (0.0003)	4.356399 (0.0000)
King-Wu	2.698075 (0.0035)	3.462803 (0.0003)	4.389812 (0.0000)
Standardized Honda	4.455277 (0.0000)	4.049262 (0.0000)	2.516458 (0.0059)
Standardized King-Wu	4.455277 (0.0000)	4.049262 (0.0000)	2.521208 (0.0058)
Gourieroux, et al.	--	--	19.27061 (0.0000)

